HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
21 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

MINGGU, 8 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 17

ACEH

Illiza Buka Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2026

Oleh Redaksi · 8 Nov, 20.49 WIB



BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal secara resmi membuka Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) Kota Banda Aceh tahun 2026, di Taman Budaya Aceh, Sabtu (8/11/2026).

Pentas tersebut menjadi ajang penampilan hasil pembelajaran seni budaya yang telah diikuti siswa SD dan SMP terpilih di ibu kota selama mengikuti program GSMS yang digagas Pemerintahan Illiza-Afdhal.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan GSMS, mulai dari dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, seniman pelatih, guru pendamping, hingga para peserta didik.

"Apa yang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada latihan, ada kerja keras, ada keberanian, dan tentu ada bimbingan dari para seniman serta guru-guru yang mendampingi," ujarnya.

Ia menjelaskan, GSMS merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh yang diarahkan untuk memperkuat pendidikan seni dan budaya di sekolah.

Program ini ditujukan kepada siswa SD dan SMP, dengan melibatkan para seniman, komunitas, dan pegiat budaya yang ada di Kota Banda Aceh.

Selengkapnya di halaman 19 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Soal Desakan Pemakzulan Gibran, Surya Paloh: Tragis, Tapi Jalankan Saja!



BANDA ACEH – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai situasi tragis yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan Politik nasional.

Meski demikian, Surya Paloh menegaskan mekanisme konstitusional tetap harus dihormati.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sri Radjasa Tuding Jokowi di Balik Penyadapan Prabowo!



BANDA ACEH - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan spekulasi serius mengenai kemungkinan adanya operasi Politik dari dalam lingkaran kekuasaan.

Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, menduga kasus tersebut berkaitan dengan apa yang disebutnya sebagai operasi Garis Dalam, yang menurut analisisnya bertujuan mempertahankan …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
EKONOMI 11
LINGKUNGAN 15
SPORT 17
Aneka Berita 19

NASIONAL

Daftar Sadap 6K jadi Tameng? Elite Akrab Listyo Jangan Cuci Tangan!



BANDA ACEH – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) terus memunculkan polemik.

Di tengah belum adanya pengumuman resmi mengenai keseluruhan daftar sasaran penyadapan, sejumlah elite mulai menyatakan diri sebagai korban.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Diminta Mundur, PAN: Jika Menolak Harus Dieksekusi Lewat Jalur Politik



BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Syarifuddin Sudding mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

22 BERITA

NASIONAL

Daftar Sadap 6K jadi Tameng? Elite Akrab Listyo Jangan Cuci Tangan!

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.47 WIB



BANDA ACEH – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) terus memunculkan polemik.

Di tengah belum adanya pengumuman resmi mengenai keseluruhan daftar sasaran penyadapan, sejumlah elite mulai menyatakan diri sebagai korban.

Namun, klaim tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk melepaskan diri dari dugaan keterkaitan dengan kelompok LSP.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Inisiator Sumatera Connection, Sutrisno Pangaribuan, mengingatkan para elite agar tidak buru-buru mencuci tangan dengan memosisikan diri sebagai korban, terlebih mereka yang sebelumnya diketahui akrab dengan LSP.

Menurut Sutrisno, tercantum dalam daftar sasaran penyadapan tidak otomatis membuktikan seseorang bersih dari kemungkinan keterlibatan dalam kelompok yang diduga menjalankan operasi tersebut. Sebaliknya, nama yang tidak tercantum juga tidak serta-merta menunjukkan seseorang terbebas dari dugaan keterkaitan.

"Saya kira para elite yang mengaku namanya ada dalam daftar 6K tidak perlu buru-buru “cuci tangan” memposisikan diri sebagai korban, padahal sebelumnya akrab dengan LSP," paparnya kepada Monitorindonesia.com, Minggu (8/11/2026).

Sutrisno menegaskan bahwa Bareskrim Polri harus mengungkap bagaimana kelompok LSP menentukan pihak-pihak yang menjadi target penyadapan ilegal.

"Komplotan LSP dalam memilih dan memilah target yang disadap secara ilegal masih harus dibongkar oleh Bareskrim Polri," kata Sutrisno.

Sorotan terhadap daftar 6K atau lebih dari 6.000 nomor telepon sebelumnya juga disampaikan Politisi Senior Akbar Faizal. Ia menyatakan ribuan nomor tersebut masuk dalam daftar sasaran dugaan penyadapan ilegal yang menyeret LSP.

Akbar Faizal mengaku namanya turut tercantum dalam dokumen tersebut. Selain dirinya, sejumlah tokoh publik disebut masuk daftar, di antaranya akademisi hukum tata negara Feri Amsari, akademisi hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Mochtar, serta pejabat internal Polri Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti yang menjabat Kabagintelkam Polri.

“Sampai pejabat kepolisian juga kena sadap, kurang ajar sekali,” ujar Akbar Faizal, Kamis (5/11/2026).

Ia menjelaskan, daftar tersebut telah disusun dalam dokumen tebal yang berisi nama, nomor telepon, serta jabatan atau profesi masing-masing pihak yang disebut menjadi sasaran.

Akbar Faizal juga menyoroti tidak adanya nama yang berasal dari keluarga maupun orang-orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar yang diklaimnya telah ia amati.

“Tak satupun keluarga Jokowi dan kroni-kroninya yang masuk daftar ini,” katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Diminta Mundur, PAN: Jika Menolak Harus Dieksekusi Lewat Jalur Politik

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.34 WIB



BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR RI, Syarifuddin Sudding mengusulkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA. Jika Gibran tidak mengundurkan diri, DPR dinilai dapat menempuh langkah Politik melalui hak konstitusionalnya.

Sudding menilai putusan MA tersebut harus ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wapres. Dia berpandangan, pembatalan dokumen persyaratan itu membuat Gibran tidak lagi memenuhi syarat konstitusional.

“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik," kata Sudding pada Minggu (8/11/2026).

Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan Gibran secara sukarela meletakkan jabatannya sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan. Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," ucapnya.

Sudding menegaskan DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya jika Gibran tidak bersedia mundur. Dia menyebut mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," ujarnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi perkara keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran. Informasi tersebut tercantum dalam situs resmi Kepaniteraan MA pada Jumat (30/10/2026).

Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

Meski demikian, usulan pemberhentian melalui jalur politik tersebut merupakan pandangan Sudding. Mekanisme dan konsekuensi hukum putusan MA terhadap jabatan Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada ketentuan konstitusi dan proses hukum yang berlaku

NASIONAL

Bahlil Ngaku Ikut Disadap ‘Dewan Jenderal’, Takut Isi Telepon Malam Ketahuan

Oleh Redaksi · 7 Nov, 19.25 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya juga menjadi korban dugaan penyadapan ilegal. Nomor telepon pribadinya disebut ikut disadap sejumlah jenderal Polri atau 'Dewan Jenderal' seperti yang dialami Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengaku merasa tidak nyaman setelah mengetahui dugaan penyadapan tersebut. Dia khawatir komunikasi dan aktivitas pribadinya turut diketahui pihak lain.

"Kepala negara disadap. Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya. Awak pun jadi disadap. Resah, takut juga itu barang disadap," ujar Bahlil di acara pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026).

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi itu kemudian berkelakar soal percakapan teleponnya yang berpotensi diketahui orang lain. Dia mengaku lebih khawatir jika percakapan yang dilakukan pada malam hari ikut terungkap.

"Karena telepon saya itu kan kelakuan siang dan malam kan ketahuan semua di situ, kan gitu. Yang saya takut itu bukan ditelepon siangnya, malamnya itu saya takut gitu," kata dia.

Namun, di balik candaan tersebut, Bahlil menegaskan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius. Dia menilai tindakan itu berpotensi menimbulkan dampak luas dan mengancam kepentingan negara.

"Wah, saya bilang ini bisa berdampak sistemik, masif, dan terstruktur ini, saya bilang," ucapnya.

Bahlil pun menyatakan Partai Golkar mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Dia meminta proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Kita, Partai Golkar, mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan. Kita mendukung penuh. Diusut tuntas, dan dilakukan secara transparan," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi

NASIONAL

Soal Polemik Ijazah Jokowi, Akademisi Unair Ingatkan Kepercayaan Politik Ada di Warga

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.18 WIB



BANDA ACEH -Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, terutama menyangkut kepercayaan Politik.

Pesan itu disampaikan oleh Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo terkait kehadiran Jokowi dalam persidangan sebagai saksi dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Ini Ulah Abuleke

Oleh Redaksi · 7 Nov, 19.19 WIB

BANDA ACEH -Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tudingan keterlibatannya dalam dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Bahlil bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang mengaitkan dirinya dengan pertemuan bersama sejumlah jenderal Polri sebelum mereka ditangkap.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada acara pelantikan DPD Partai Golkar Maluku, dikutip Sabtu, 7 November 2026.

Bahlil mengaku justru menjadi salah satu korban penyadapan. Karena itu, ia mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.

"Kita Partai Golkar mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan," tegasnya.

Bahlil kemudian menyoroti informasi yang menyebut adanya pertemuan antara ketua umum partai Politik dengan sejumlah jenderal, tiga jam sebelum para perwira tersebut ditangkap.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Soal Desakan Pemakzulan Gibran, Surya Paloh: Tragis, Tapi Jalankan Saja!

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.53 WIB



BANDA ACEH – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai situasi tragis yang tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan Politik nasional.

Meski demikian, Surya Paloh menegaskan mekanisme konstitusional tetap harus dihormati.

Apabila seluruh persyaratan dan prosedur telah terpenuhi, sementara pemakzulan menjadi satu-satunya jalan penyelesaian, maka proses tersebut dapat dijalankan saja dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh saat meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang, Minggu (8/11/2026).

Ia merespons polemik yang berkembang menyusul kabar mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang disebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).

"Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silakan (dimakzulkan), kan sudah ada aturannya. Tapi kalau ada alternatif lain bisa dipertimbangkan, kita pikir lagi," kata Surya Paloh.

Menurut Surya, persoalan tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tidak semakin memperkeruh suasana politik dan kehidupan masyarakat.

Baginya, menjaga persatuan bangsa jauh lebih penting daripada membiarkan polemik berkepanjangan yang berpotensi memperlebar perbedaan.

Ia berharap suasana kebatinan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Jangan sampai persoalan politik justru terus-menerus menghadirkan kesedihan dan mengganggu keharmonisan di tengah kehidupan berbangsa.

"Saya ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat bisa terjaga secara baik. Tidak dari waktu ke waktu kita terus-menerus harus bisa merasakan kesedihan di antara kesatuan masyarakat," ujarnya.

Surya Paloh mengaku prihatin karena wacana pemakzulan muncul ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas pemerintahan.

Ia bahkan menyebut situasi tersebut sebagai musibah bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, kondisi politik seperti ini bukan sesuatu yang diharapkan terjadi dalam perjalanan kehidupan bernegara.

"Ini kan barangkali adalah musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tibatiba wakil presiden ada rencana (pemakzulan). Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan tragis dan ini bukan yang kita harapkan tentunya," tutur Surya.

Kendati menyampaikan keprihatinan, Surya Paloh tidak menutup kemungkinan pemakzulan ditempuh apabila memang menjadi konsekuensi dari ketentuan konstitusi yang berlaku

NASIONAL

Sri Radjasa Tuding Jokowi di Balik Penyadapan Prabowo!

Oleh Redaksi · 8 Nov, 11.14 WIB



BANDA ACEH - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan spekulasi serius mengenai kemungkinan adanya operasi Politik dari dalam lingkaran kekuasaan.

Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, menduga kasus tersebut berkaitan dengan apa yang disebutnya sebagai operasi Garis Dalam, yang menurut analisisnya bertujuan mempertahankan pengaruh politik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo.

Dalam analisisnya, Sri Radjasa mengaitkan dugaan operasi tersebut dengan keberadaan jaringan pejabat yang disebut sebagai Geng Solo, yang dikaitkannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai jaringan tersebut merupakan bagian dari strategi politik dan perang informasi untuk menjaga pengaruh di lingkungan pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Sri Radjasa dalam wawancara di program Bikin Terang yang ditayangkan melalui kanal YouTube.

"Hati-hati Mbak, Jokowi ini sedang melakukan operasi garis dalam," ujar Sri Radjasa dikutip Minggu (8/11/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik politik. Sri Radjasa bahkan menguraikan empat strategi yang menurutnya menjadi bagian dari dugaan operasi Garis Dalam.

Pertama, mempertahankan jaringan pejabat yang disebut sebagai Geng Solo, yang menurutnya berasal dari kalangan kepolisian dan militer.

Kedua, memobilisasi relawan dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat dukungan politik.

Ketiga, membangun aliansi dengan kelompok buruh, pemuda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keempat, menyiapkan strategi perang informasi yang menurutnya mencakup aktivitas penyadapan.

Dari empat strategi tersebut, dugaan penyadapan menjadi bagian yang paling serius disorot. Sri Radjasa menghubungkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dengan strategi perang informasi yang disebutnya sedang berlangsung.

Bahkan, ia secara terbuka melontarkan tudingan bahwa Jokowi diduga menjadi pihak yang menggunakan hasil penyadapan tersebut.

"Jadi kalau kita lihat sekarang ini terbongkarnya terjadi penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit, saya punya keyakinan dan saya berani bertaruh penggunanya adalah Jokowi," tegasnya.

Tudingan tersebut merupakan klaim pribadi Sri Radjasa. Hingga kini, belum ada bukti independen yang memastikan Jokowi menjadi pengguna hasil penyadapan sebagaimana dituduhkan.

Tak berhenti pada dugaan keterlibatan jaringan politik, Sri Radjasa juga menyinggung keberadaan seorang advokat berinisial MR yang menurut klaimnya berada di lokasi penggerebekan sebuah rumah di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Ia mengaku memperoleh informasi mengenai keberadaan advokat tersebut dari sumber yang dikaitkannya dengan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

NASIONAL

Selamat Ginting: Ada Beberapa Menteri dan Komisaris BUMN akan Ditangkap

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.16 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam daftar sekitar 6.000 nama yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Menurut Selamat, daftar tersebut justru tidak memuat sejumlah nama yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, Pratikno, dan sejumlah tokoh lainnya.

“Yang dikemukakan dari enam ribuan daftar nama itu tidak ada KGB, Kaesang, Gibran, Bobby. Tidak ada orang-orang lingkaran dekat dari Presiden Jokowi, Pratikno, kemudian yang lainnya, tidak ada,” kata Selamat Ginting, Sabtu (7/11/2026).

Sebaliknya, ia menyoroti munculnya nama-nama orang yang selama ini dikenal berseberangan atau kritis terhadap Jokowi.

“Yang ada adalah kita-kita yang suka hadir di sini. Ada tuh yang kontra dengan Jokowi misalnya. Itu ada apa? Kemudian Wapres Gibran juga tidak ada,” ujarnya.

Selamat menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai perkara hukum biasa. Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan nasional dan berpotensi menjadi perhatian internasional.

“Oleh karena itu kita harus melihatnya, ini bukan soal hukum semata, tetapi ini adalah kasus kejahatan luar biasa. Dunia juga melihat ini. Ini bukan isu nasional lagi, tetapi isu internasional,” tegasnya.

Selamat bahkan mengaku telah memperkirakan adanya sekitar 14 perwira tinggi yang berpotensi terseret dalam perkara tersebut.

Ia menduga sejumlah perwira tinggi itu bisa menjadi tersangka apabila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan mereka.

“Saya sampai menghitung ketika tanggal 1, ini ada sekitar 14 perwira tinggi yang akan terseret, yang saya duga akan menjadi tersangka,” ungkapnya.

Untuk menggambarkan besarnya kemungkinan dampak Politik dan keamanan dari perkara tersebut, Selamat membandingkannya dengan peristiwa penangkapan sejumlah menteri pada era Presiden Soekarno setelah Gerakan 30 September 1965.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan perkara ini bisa membawa konsekuensi politik yang luas, terutama apabila dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dan aparat keamanan terbukti.

Dalam perbincangan tersebut, Selamat juga ditanya mengenai dugaan arah keterlibatan Jokowi dalam perkara penyadapan terhadap Prabowo.

Menanggapi pertanyaan itu, Selamat membenarkan bahwa dirinya melihat adanya indikasi yang mengarah kepada mantan Presiden Jokowi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aksi Rakyat Bela Indonesia Digelar di Jaksel Besok, Tuntut Proses Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.23 WIB



BANDA ACEH - Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) akan menggelar aksi di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Aksi yang diperkirakan diikuti ribuan orang itu membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Organizing Committee (OC) ARBI, Bachtiar Nasir mengatakan, rangkaian aksi akan dimulai dengan salat subuh berjemaah di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diisukan Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo, Bahlil: Saya Juga Disadap!

Oleh Redaksi · 7 Nov, 13.00 WIB

BANDA ACEH - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, spekulasi itu tidak masuk akal dan merupakan pembodohan publik.

Bahlil mengatakan bahwa dirinya turut menjadi korban dari praktik penyadapan ilegal tersebut.

"Jadi, ini mereka membangun persepsi seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap," kata Bahlil dalam pidato di acara partai, Sabtu (7/11/2026).

Dia pun menyindir penyebar hoaks tersebut dengan istilah bahasa lokal Timur "abu leke" yang berarti omong kosong.

"Abu leke ini, asli abu leke. Ini asli ilmu abu leke ini. Ya, ini abu leke ini. Kreatif dikit gitu loh, kreatif dikit," kata dia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tessa Mahardhika dan Ambar Soeseno Diseret dalam Dugaan Bocornya Dokumen Rahasia KPK

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.05 WIB



BANDA ACEH — Dugaan kebocoran dokumen rahasia penyidikan kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN menyeret dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial TS dan MS.

MAKI mengungkap keduanya diduga berkomunikasi dengan tersangka Arif Sugiyanto sebelum operasi tangkap tangan (OTT) 14 September 2026.

KPK membenarkan tengah melakukan pemeriksaan internal untuk mengusut dugaan kebocoran informasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan melibatkan Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas).

“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Budi menegaskan pemeriksaan masih berjalan. KPK juga memastikan dugaan kebocoran dokumen tidak menghentikan pengusutan perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN.

“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ujarnya.

Namun, dugaan kebocoran ini memunculkan persoalan serius setelah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut telah mengantongi identitas dua pegawai KPK yang diduga membocorkan informasi penanganan perkara kepada Arif Sugiyanto.

Boyamin menyebut TS merupakan pejabat di Direktorat Penyelidikan KPK, sedangkan MS bertugas di Direktorat Koordinasi dan Supervisi. Keduanya disebut berasal dari lembaga lain sebelum bergabung dengan KPK.

Menurut Boyamin, terdapat jejak komunikasi melalui telepon seluler antara kedua pegawai tersebut dengan Arif sebelum OTT. Ia juga menduga tersangka memanfaatkan informasi maupun dokumen yang diperoleh untuk kepentingannya.

“Tersangka dalam melakukan modus operandi dengan cara mengaku dekat dengan personel KPK dan nyatanya terdapat jejak komunikasi HP antara tersangka dan oknum personel KPK,” ungkap Boyamin.

MAKI telah meminta Dewas KPK memeriksa pihak-pihak yang disebut terlibat. Boyamin menegaskan, apabila dugaan pembocoran terbukti, sanksi tidak semestinya berhenti pada hukuman etik.

“Sehingga, mestinya TS dan MS itu nanti malah diberhentikan dengan tidak hormat atau diminta mengundurkan diri karena diduga membocorkan proses-proses penegakan hukum di KPK,” tegasnya.

Boyamin juga mengancam membawa persoalan tersebut ke jalur hukum apabila pemeriksaan Dewas tidak menunjukkan perkembangan. Ia menyebut opsi praperadilan maupun gugatan perbuatan melawan hukum.

Dugaan kebocoran dokumen ini sebelumnya telah disorot Monitorindonesia.com. Dalam pemberitaan 5 November 2026, Monitorindonesia.com mengungkap sumber di lingkungan penegak hukum antirasuah menyebut adanya dugaan komunikasi antara Arif Sugiyanto dengan dua pejabat KPK, yakni Direktur Penyelidikan Tessa Mahardhika Sugiarto dan anggota Tim Koordinasi dan Supervisi Ambar Soeseno.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penyadapan Presiden dan Isu Makar Listyo Cs, Jimly: Motif Terungkap di Pengadilan, Hukuman Bisa Mati

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.57 WIB



BANDA ACEH –- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyoroti serius dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pihak atau jenderal di lingkungan kepolisian.

Jimly mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan pemerintahan hingga dugaan makar.

Menurut Jimly, motif sebenarnya belum bisa disimpulkan hanya berdasarkan indikasi yang muncul dan akan terungkap di pengadilan.

Apakah penyadapan itu bertujuan mengancam keselamatan Presiden, membuat Prabowo tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau bahkan mengkhianati kepentingan negara, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum.

Ia mengingatkan agar dugaan makar tidak serta-merta dilekatkan kepada pihak-pihak yang terlibat sebelum ada pembuktian di pengadilan.

"Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akarnya. Nanti pasti di forum pengadilan ini akan terungkap motifnya apa, apa betul mau membunuh presiden atau mau membuat presiden lumpuh, tidak lagi menjalankan, tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan, atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara," kata Jimly dalam tayangan Kompas TV, Minggu (8/11/2026)/

Jimly menilai, apabila terbukti memenuhi unsur makar, perbuatan tersebut dapat membawa konsekuensi hukum yang sangat berat, bahkan menurutnya bisa diancam hukuman mati.

Namun, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut masih membutuhkan pembuktian yang kuat.

Pengadilanlah yang nantinya berwenang menguji fakta, motif, serta unsur pidana dalam perkara tersebut.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi, nanti pembuktiannya di forum pengadilan," ujarnya

NASIONAL

Jokowi hingga Gibran Hadiri Resepsi Dhaup Ageng di Pura Mangkunegaran

Oleh Redaksi · 7 Nov, 10.37 WIB

BANDA ACEH -Resepsi pernikahan agung atau Dhaup Ageng Pura Mangkunegaran, yakni prosesi pernikahan adat agung di lingkungan keluarga besar Mangkunegaran, berlangsung di Solo, Jawa Tengah, Jumat malam 6 November 2026.

Acara pernikahan GRAj Ancillasura Marina Sudjiwo atau Gusti Sura dengan KPH FX Adimas Rosidian itu dihadiri sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersama keluarga.

Gibran Rakabuming Raka tiba lebih dahulu bersama istrinya, Selvi Ananda. Tak lama berselang, Jokowi dan Iriana Jokowi menyusul. Begitu juga dengan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, bersama istrinya, Erina Gudono, dan anak mereka.

Kedatangan keluarga Jokowi disambut langsung oleh KGPAA Mangkunegara X yang keluar dari Ndalem Ageng. Mereka sempat berbincang hangat sebelum memasuki area resepsi.

Gibran dan Selvi, bersama Jokowi serta Iriana, kemudian menempati tempat duduk di Paringgitan. Sementara itu, Kaesang dan Erina berada di Pendapa Ageng. Gibran juga sempat menyapa awak media yang menunggu di lokasi dengan ucapan singkat, "Malam."

Selain keluarga Jokowi, sejumlah tokoh penting turut menghadiri resepsi pernikahan GRAj Ancillasura Marina Sudjiwo atau Gusti Sura dengan KPH FX Adimas Rosidian tersebut.

Di antaranya Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama GKR Hemas dan putri-putrinya, serta KGPAA Paku Alam bersama GKBRAA Paku Alam. Hadir pula Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, putri Presiden ke-2 RI Soeharto, bersama keluarga Cendana.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dituding Rapat dengan Jenderal Terkait Penyadapan, Bahlil Ancam Layangkan Somasi: Jangan Fitnah!

Oleh Redaksi · 7 Nov, 13.05 WIB

BANDA ACEH - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bereaksi keras setelah namanya dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Dia membantah tudingan sempat menggelar pertemuan rahasia dengan sejumlah jenderal polisi sebelum penangkapan terkait skandal tersebut.

Bahlil bahkan mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak yang menyebarkan tudingan tersebut. Dia menegaskan tidak akan tinggal diam jika namanya terus diseret dalam isu yang dinilai berbahaya dan mencemarkan nama baik.

Bahlil mengaku baru mengetahui namanya dikaitkan dengan kasus tersebut setelah mendarat dari penerbangan pagi. Dia dituding sebagai ketua umum partai yang bertemu sejumlah perwira tinggi polisi tiga jam sebelum mereka diamankan.

"Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka," ujar Bahlil dalam pidatonya, Sabtu (7/11/2026).

Dia kemudian menyoroti pernyataan seorang tokoh senior yang menyampaikan tudingan tersebut melalui podcast di media sosial. Bahlil meminta pihak yang menuduhnya menunjukkan bukti.

"Dan saya memberikan kepada tadi itu ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, ya sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya," katanya.

Bahlil memastikan akan mengambil langkah hukum jika tudingan tersebut tidak disertai bukti. Dia bahkan memberikan tenggat waktu kepada pihak yang dianggap menyebarkan fitnah sebelum membawa perkara tersebut ke jalur hukum.

"Dan saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Luke Susilo Sebut Kesaksian Jokowi di Sidang Janggal, Pertanyakan Foto Wisuda UGM

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.00 WIB



BANDA ACEH - Aktivis Terus Jadi Anti Pembual (Terjal), Luke Susilo, menyoroti sejumlah kejanggalan dan ketidaksesuaian fakta terkait kesaksian Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan kasus dugaan fitnah terkait polemik ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Luke menilai, kehadiran Jokowi di persidangan dengan membawa ijazah asli belum mampu menjawab keraguan publik.

Menurutnya, kesaksian tersebut justru memunculkan pertanyaan baru terkait data dan fakta historis yang disampaikan. Salah satu poin yang disoroti Luke adalah pernyataan Jokowi mengenai jumlah peserta wisuda Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 19 November 1985. Di hadapan majelis hakim, Jokowi menyebut dirinya diwisuda bersama 14 orang lainnya.

"Pak Jokowi menyebutkan di persidangan bahwa wisudanya berjumlah 14 orang. Namun, jika kita mencocokkan dengan foto wisuda yang beredar luas di publik dan sempat diunggah Prof. Henri Subiakto, di foto tersebut terpampang jelas ada 15 orang," ujar Luke Susilo di Jakarta.

Luke mempertanyakan perbedaan jumlah tersebut yang dinilainya tidak konsisten.

"Saya sampai mengulang-ulang mendengarkan kesaksian beliau. Di sidang kedua Dokter Tifa pun beliau bilang diwisuda bersama 14 orang lainnya. Kalau di foto ada 15 orang, lalu satu orang ini siapa? Apakah ini yang dulu kerap diistilahkan sebagai 'penumpang gelap'?" cetusnya.

Selain jumlah wisudawan, Luke juga menyoroti asal-usul foto ijazah beresolusi tinggi yang belakangan beredar di media sosial melalui akun Dian Sandi dan sejumlah akun lainnya. Dia mempertanyakan mengapa sumber foto tersebut belum terungkap, meski penanganan laporan hukum kasus ini telah berlangsung sejak 30 April 2025.

"Ini sudah berjalan satu setengah tahun lebih sejak laporan dibuat. Sangat tidak masuk akal jika penyidik atau pihak terkait masih belum mengusut dari mana sumber foto asli tersebut berasal. Dulu pada 2022 saat isu ini mencuat, pihak UGM memamerkan foto ijazah via proyektor. Mengapa tidak ditelusuri siapa yang mengunggah atau memegang file aslinya saat itu?" tegas Luke.

Dia juga menyinggung dugaan kebocoran dokumen dari lingkaran terdekat. Luke menyebut, sebelum akun Dian Sandi mengunggah foto ijazah pada 1 April 2025, terdapat akun lain, seperti Ahmad Kriwil dan Handik Hermanto, yang mengunggah foto serupa sehari sebelumnya, yakni 31 Maret 2025.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.30 WIB



BANDA ACEH -Apresiasi tinggi diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto atas langkah tegas dan cepat dalam menangkap serta menetapkan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan pakar hukum Djamaludin Koedoeboen kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 7 November 2026.

Djamaludin menilai bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh oknum jenderal kepolisian, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa.

Ia menyebutkan kasus ini terindikasi sebagai sebuah bentuk konspirasi serius yang mengarah pada upaya pembunuhan berencana atau makar terhadap kepala negara.

"Ini adalah konspirasi. Dalam konteks hukum dikenal sebagai makar, tapi saya lebih cenderung menggunakan istilah konspirasi pembunuhan terhadap Presiden Prabowo," kata Djamaludin.

Menurutnya, dugaan tersebut diperkuat oleh rangkaian peristiwa dan wacana yang sempat beredar di ruang publik mengenai upaya pembatasan masa jabatan presiden serta skenario peralihan kekuasaan.

Djamaludin menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal terhadap aktivitas, lokasi dan komunikasi harian presiden merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa kepala negara.

Djamaludin mendesak agar Polri mengusut tuntas siapa pihak-pihak di balik layar yang memberikan perintah atau memanfaatkan data hasil sadapan ilegal tersebut.

"Termasuk kemungkinan keterlibatan pihak eksternal, oligarki, maupun aktor Politik tertentu," kata Djamaludin.

Djamaludin meyakini bahwa Kapolri Suyudi Ario Seto bersama jajarannya akan bekerja secara profesional, transparan dan berpihak penuh pada konstitusi serta keselamatan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Djamaludin juga menyoroti pengamanan ibu kota dan langkah-langkah antisipatif yang diambil pemerintah bersama TNI dalam mempertebal pengamanan strategis guna mencegah potensi sabotase.

Djamaludin mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bersatu memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI, Polri, serta jajaran penegak hukum lainnya.

"Tentu kita sangat berharap agar pihak kepolisian tetap fokus menjalankan agenda pembangunan nasional tanpa terganggu oleh upaya-upaya distabilisasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," tandas Djamaludin.

NASIONAL

Ijazah Jokowi Diperlihatkan di Sidang, Pakar Komunikasi Politik Sebut Membentuk Persepsi Positif

Oleh Redaksi · 7 Nov, 19.32 WIB

BANDA ACEH- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memperlihatkan dokumen ijazahnya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Hal itu menjadi perhatian dalam dinamika komunikasi Politik. Namun, tindakan tersebut belum tentu menghasilkan penilaian yang sama di tengah masyarakat.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai respons masyarakat terhadap penampilan Jokowi di persidangan sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan politik yang telah terbentuk sebelumnya.

"Bila sikap awal publik terhadap Jokowi positif, maka komunikasi yang dibangun Jokowi selama di persidangan akan dapat mempengaruhi persepsi publik yang juga positif. Sebaliknya, bila sikap awal publik terhadap Jokowi sudah negatif, maka apa pun komunikasi yang dibangun Jokowi di persidangan akan melahirkan persepsi yang juga negatif," ujar Jamiluddin.

Menurutnya, perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik seorang tokoh tidak selalu diterima secara seragam oleh masyarakat.

Jamiluddin menjelaskan, selama persidangan Jokowi memperlihatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang relatif terkendali. Mantan presiden tersebut dinilai mampu menjaga intonasi dan pembawaannya ketika menjawab berbagai pertanyaan.

"Penggunaan intonasi dan nada bicara Jokowi cenderung datar, tenang, dan tidak menunjukkan fluktuasi emosi yang tinggi, tidak meledak-ledak ataupun defensif berlebihan," jelasnya.

Selain pembawaan yang tenang, Jamiluddin juga menyoroti tindakan Jokowi yang meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan langsung dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 kepada pengunjung persidangan.

Ia menilai tindakan tersebut menjadi bagian dari komunikasi visual yang dapat membentuk persepsi mengenai kesiapan Jokowi menghadapi proses hukum.

Jamiluddin juga melihat sikap Jokowi yang mengikuti persidangan secara tertib sebagai upaya menampilkan dirinya sebagai warga negara yang menghormati prosedur hukum.

"Jokowi ingin menunjukkan sebagai warga negara kebanyakan yang patuh dan taat aturan. Jokowi tidak menunjukkan layaknya mantan presiden," katanya.

Meski demikian, Jamiluddin menilai penampilan tersebut juga dapat dibaca sebagai strategi komunikasi untuk membangun citra. Dampaknya tetap bergantung pada cara masyarakat memaknai tindakan Jokowi.

Sementara itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair), Dr. Suko Widodo, menilai polemik ijazah Jokowi tidak lagi sebatas persoalan administratif, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan politik.

"Polemik ini telah bergeser dari persoalan administratif menjadi persoalan kepercayaan politik," ujar Suko.

Menurutnya, teori framing menjelaskan bagaimana fakta yang sama dapat memperoleh penafsiran berbeda sesuai pandangan politik masing-masing kelompok.

ACEH

Patroli Bersepeda, Kapolda Aceh Sambangi SPBU dan Pastikan Distribusi BBM Lancar

Oleh Redaksi · 7 Nov, 21.06 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyambangi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Banda Aceh saat melaksanakan patroli menggunakan sepeda pada Jumat malam (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, patroli tersebut merupakan bagian dari upaya Kapolda Aceh untuk melihat langsung kondisi di lapangan, baik terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan sehari-hari warga.

“Dengan bersepeda menyusuri sejumlah ruas jalan, Kapolda Aceh memantau situasi sekaligus mengecek kondisi SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah tanpa menghadapi antrean dalam proses pengisian,” ujar Joko dalam keterangannya setelah kegiatan.

Ia menegaskan, Polda Aceh akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

“BBM akan kami awasi terus agar penyalurannya tepat sasaran dan masyarakat mudah mendapatkannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Henri Subiakto: Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.55 WIB



BANDA ACEH - Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, mengaku mulai mengubah pandangannya terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sejak akhir 2022.

Perubahan itu terjadi setelah dirinya menemukan sejumlah bukti yang menurutnya menunjukkan perbedaan antara citra Jokowi dengan kenyataan.

Henri mengaku sebelumnya percaya bahwa Jokowi merupakan sosok pemimpin yang jujur dan sederhana.

Informasi negatif mengenai Jokowi kala itu dianggapnya sekadar berasal dari pihak-pihak yang tidak menyukainya.

Namun, pandangannya berubah setelah menemukan berbagai hal yang membuatnya mempertanyakan sosok mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Dulu saya juga percaya Jokowi itu pemimpin jujur dan sederhana. Kalau ada informasi yang mengungkap keburukan Jokowi, saya anggap hanyalah produk orang-orang yang membencinya. Tapi sejak akhir 2022 saya menemukan banyak bukti, yang membuat makin meyakini bahwa Jokowi itu, antara apa yang diucapkan dan ditampilkan sangat beda dengan kenyataan," ujar Henri, lewat akun X miliknya, Minggu, 8 November 2026.

Ia mengakui Jokowi telah membangun berbagai infrastruktur selama menjabat sebagai presiden.

Namun, menurut Henri, capaian tersebut tidak menghapus persoalan lain yang ditimbulkan selama kepemimpinannya.

Henri bahkan melontarkan kritik keras terhadap Jokowi dan keluarganya.

Ia menilai berbagai persoalan yang dikaitkan dengan keluarga Jokowi selama ini tertutupi oleh strategi komunikasi dan pencitraan yang masif.

"Jokowi walau sudah membangun infrastruktur, tapi faktanya di sisi lain dia adalah sumber masalah bangsa ini. Jokowi dan keluarganya itu asli sangat greedy tapi semua keburukan nyata itu bisa ditutupi," katanya.

Menurut Henri, pembentukan citra positif Jokowi dilakukan melalui strategi komunikasi yang melibatkan buzzer, lembaga survei, berbagai media, organisasi kemasyarakatan, hingga para pendukungnya.

Strategi tersebut, lanjutnya, membuat Jokowi dipandang sebagai sosok pemimpin yang baik dan layak dihormati oleh sebagian besar masyarakat.

Henri meyakini, seiring berjalannya waktu, berbagai fakta yang selama ini dipersoalkan publik akan semakin terbuka dan tidak bisa terus ditutupi.

Ia menyinggung persoalan identitas dan ijazah Jokowi hingga dugaan penyadapan yang belakangan menjadi sorotan.

Henri mengaitkan persoalan penyadapan tersebut dengan orang-orang yang menurutnya selama ini dekat dan loyal kepada Jokowi.

"Kebenaran senantiasa akan muncul untuk menghukum dan menenggelamkan kejahatan yang nyata. Dimulai dengan persoalan identitas dan ijazah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.35 WIB



BANDA ACEH -Kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, mustahil bukan untuk tujuan makar.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, dikutip Minggu 8 November 2026.

"Kalau yang disadap tukang bakso, tukang cilok, tukang mie ayam. Bolehlah pasal pidananya tak dikaitkan dengan makar. Karena tak mungkin ada motif kekuasaan, dalam kasusnya," kata Khozinudin.

Namun, kata Khozinudin, penyadapan tersebut sudah jelas membidik Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, pimpinan partai Politik, tokoh media, aktivis, dan pengusaha.

"Bahkan, informasi terakhir total jumlah yang disadap 6.000 orang," kata Khozinudin.

Karena itu, lanjut Khozinudin, terlalu naif jika kasus ini hanya berpatokan pada ketentuan Pasal 258 KUHP (penyadapan ilegal), Pasal 332 KUHP (akses ilegal), dan Pasal 32 UU ITE (editing ilegal).

"Karena semua itu baru bicara aktivitas dan tujuan, belum masuk pada motif. Padahal, hukum pidana selain mengungkap tujuan juga wajib merembet ke motif," kata Khozinudin.

Menurut Khozindin, motif tak selalu harus berdasarkan keterangan tersangka. Tersangka, pasti bohong. Kecuali ada keinsyafan untuk taubat dan mencintai negara serta ingin menebus dosa dengan memberikan informasi yang jujur untuk menyelamatkan negara setelah sebelumnya mereka rusak.

Motif juga dapat dibaca dari hukum kausalitas. Dan dalam teori pidana, kausalitas ini adalah hukum sebab akibat yang menerangkan mengapa kejahatan bisa terjadi atau dilakukan. Apa penyebab penyadapan? Apa akibat dari penyadapan?

Sebab penyadapan sudah jelas mengarah ke motif kekuasaan. Akibat penyadapan, jelas membahayakan nyawa Presiden, menghilangkan kemerdekaan Presiden bahkan secara substansi melumpuhkan Presiden hingga tak dapat menjalankan kekuasaan secara efektif karena seluruh informasi telah diketahui dan dikendalikan pihak lain.

"Negara tak boleh ragu untuk menindak kasus makar ini. Memproses hukum hingga ke aktor intelektualnya," pungkas Khozinudin.

NASIONAL

Viral Rekaman Audio Sebut Prabowo Disajikan Es Buah Mengandung Arsenik Sebelum Dilantik

Oleh Redaksi · 7 Nov, 14.09 WIB

BANDA ACEH - Sebuah rekaman audio yang diunggah akun X @yaniarsim (7 November 2026) tengah beredar luas dan memicu perbincangan.

Dalam audio tersebut, seorang narator menceritakan kejadian yang diklaim terjadi setelah Pemilu 2024, ketika Prabowo Subianto sudah menjadi presiden terpilih namun belum dilantik (pelantikan 20 Oktober 2024).

Menurut narator, Prabowo menghadiri buka puasa bersama di sebuah partai (nama partai tidak disebutkan).

Seorang teman dekat narator sejak kecil menjadi ketua panitia acara tersebut.

Sebagai presiden terpilih, Prabowo sudah dikawal Paspampres, namun masih Paspampres era presiden sebelumnya.

Narator mengisahkan soal makanan yang disajikan, khususnya es buah.

Tim pengawal menguji makanan tersebut dan menyatakan aman, lalu makanan diisolasi.

Namun, tim Prabowo mengirimkan pemeriksaan ulang. Hasilnya diklaim reaktif arsenik, sehingga makanan tersebut disingkirkan.

https://www.twitter.com/yaniarsim/status/2118868344824848579/

Unggahan ini langsung dikaitkan banyak warganet dengan pernyataan lama Connie Rahakundini Bakrie pada awal 2024.

Pada Februari 2024, Connie sempat viral karena mengklaim mendapat informasi dari Rosan Roeslani (saat itu Ketua TKN Prabowo-Gibran) bahwa Prabowo hanya akan menjabat dua tahun, lalu digantikan Gibran.

Rosan membantah keras dan justru menyatakan bahwa Connie sendiri yang mengucapkan kemungkinan Prabowo diracun.

Menurut Rosan, Connie mengatakan kira-kira: "Ini gimana kalau sudah 2 tahun, atau kalau tiba-tiba Pak Prabowo, saya ini orang intelijen, bisa saja Pak Prabowo diracun, bisa lebih cepat, itu gimana?"

Rosan menilai pernyataan tersebut tidak pantas dan melaporkan Connie ke Bareskrim atas dugaan pencemaran nama baik.

Prabowo sendiri saat itu mendukung langkah Rosan.

Connie juga pernah mengaitkan isu serupa dengan informasi yang didengar Hasto Kristiyanto soal Prabowo hanya menjabat tiga tahun.

Kini, di tengah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri (Istana menyebut indikasi makar), rekaman audio ini kembali memunculkan narasi lama soal ancaman terhadap Prabowo.

Mahfud MD dan sejumlah pihak juga sempat mengungkit pernyataan Connie terkait skenario masa jabatan singkat Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ahmad Doli Kurnia Buka Suara Perihal Flyer Munaslub Golkar: Saya Tidak Ada Kaitannya!

Oleh Redaksi · 7 Nov, 10.34 WIB

BANDA ACEH -Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung buka suara perihal beredarnya flyer atau poster di media sosial (medsos) bahwa Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pergantian Ketua Umum dari Bahlil Lahadalia ke Ahmad Doli Kurnia.

Dalam flyer itu tertulis seruan "Sukseskan Munaslub Partai Golkar", "Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo", "Caketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung-Tokoh Sentral Partai Golkar". Adapun, Munaslub akan digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada Minggu 29, November 2026.

"Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut," tegas Doli kepada RMOL, Sabtu, 7 November 2026.

Doli menegaskan, dirinya selalu mengedepankan pendekatan konstitusional dan institusional dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, maupun bernegara.

Dia mengingatkan bahwa seluruh mekanisme organisasi telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi yang wajib dipatuhi seluruh kader.

"Begitu juga secara institusional, saya sangat mengerti struktur dan hierarki kewenangan serta tanggung jawab dalam berorganisasi dan ber-partai," ujarnya.

Atas dasar itu, Doli memastikan hubungannya dengan Bahlil selama ini berjalan baik, harmonis, dan saling menghormati, terutama dalam pengelolaan partai.

"Saya dan Saudara Bahlil sudah berkoordinasi dan menyadari secara bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ketua Fraksi PAN MPR: Gibran Sebaiknya Legowo Mundur

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.20 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya legowo mengundurkan diri, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh HM Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang dipakai dalam Pilpres 2024.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) MPR Syarifuddin Sudding melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 7 November b2026.

Berdasarkan putusan perkara kasasi Nomor: 742 K/TUN/2026, tanggal 30 Oktober 2026, dinyatakan Suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum, dan memerintahkan agar surat keterangan tersebut dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

"Dalam putusan tersebut, dokumen yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah," kata Sudding.

Jika Gibran tidak bersedia mundur, Sudding menilai, DPR perlu mengambil langkah Politik melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Menurut Sudding, putusan MA yang mengabulkan kasasi dalam perkara dugaan perbuatan melawan hukum terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tersebut bersifat eksekusitorial. Sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa eksekusi.

"Sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik," kata Sudding.

Anggota Komisi III DPR itu berpendapat, putusan MA tidak boleh berhenti sebagai keputusan pengadilan tanpa tindak lanjut. Ia menilai pembatalan dokumen persyaratan pencalonan tersebut berdampak terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.

Karena itu, Sudding menyarankan agar Gibran secara sukarela meletakkan jabatannya demi menghormati putusan pengadilan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

"Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Apalagi sudah tidak memiliki legitimasi secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi. Secara moral, ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat karena jabatan wakil presiden merupakan jabatan publik," kata Sudding.

Sudding menegaskan, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, DPR dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh, menurut dia, adalah penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh DPR sebagai bagian dari proses politik dan ketatanegaraan.

"Kalau dia tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap melalui hak menyatakan pendapat, dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," kata Sudding.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah 'Perkalian Nol'

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.41 WIB



BANDA ACEH -Prestasi seseorang tidak lagi memiliki nilai apabila terbukti melakukan pelanggaran serius, termasuk penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons sindiran mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu di media sosial yang menyebut dirinya sebagai pemuja Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Sindiran itu merujuk pada pernyataan Habiburokhman dalam rapat paripurna pengesahan RUU Polri pada 9 Juni 2026 yang menyebut Listyo Sigit sebagai salah satu Kapolri sepanjang masa.

Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan sindiran tersebut. Namun, ia mengingatkan adanya doktrin perkalian nol atau zero multiplier yang diajarkan seniornya di Partai Gerindra.

Doktrin tersebut menempatkan loyalitas dan integritas sebagai faktor penentu dalam menilai kemampuan seseorang. Sebesar apa pun prestasi yang dimiliki, nilainya menjadi nol apabila dikalikan dengan nol.

"Begitu juga dalam konteks LSP ini. Saat rapat paripurna 6 Juni 2026 tersebut kita semua belum mengetahui adanya kejahatan penyadapan ilegal," kata Habiburokhman dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 7 November 2026.

Menurutnya, seluruh prestasi Listyo Sigit sebelumnya tidak lagi bernilai apabila terbukti melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, termasuk dirinya.

"Namun segala prestasi dia sebelumnya seberapapun hebatnya menjadi tidak bernilai sama sekali alias nol ketika terbukti melakukan tindakan menyadap Presiden Prabowo dan banyak pihak lain termasuk saya sendiri," tegasnya.

Habiburokhman meminta semua pihak saat ini fokus mendukung Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus penyadapan ilegal tersebut.

Legislator Gerindra ini pun menegaskan, seluruh pihak yang terlibat harus diproses hukum. Tidak hanya pelaku, latar belakang dan motif di balik dugaan penyadapan juga harus diungkap secara tuntas.

"Saat ini saatnya kita fokus mendukung Kapolri untuk mempercepat pengungkapan kasus penyadapan ilegal ini. Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya," pungkasnya

ACEH

Kepala BBPOM Aceh Perkuat Peran Apoteker sebagai Garda Terdepan Keamanan dan Mutu Obat

Oleh Redaksi · 7 Nov, 20.46 WIB

ACEH BESAR – Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh), Riyanto, menegaskan pentingnya penguatan peran apoteker dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat yang beredar di masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Penutupan dan Sesi Pleno Puncak Pekan Ilmiah Tahunan (PIT) Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Aceh sekaligus peringatan World Pharmacists Day (WPD) 2026 di The Padee Hotel, Aceh Besar, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "United Pharmacist, One Standard for Seamless Pharmaceutical Care" tersebut diikuti sekitar 300 apoteker dari berbagai daerah di Aceh maupun provinsi lainnya. Pertemuan ilmiah ini menjadi ruang bagi para apoteker untuk memperbarui pengetahuan, meningkatkan kompetensi, mempererat silaturahmi, serta memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian.

Dalam sambutannya, Riyanto menyampaikan apresiasi kepada PD IAI Aceh dan seluruh panitia atas terselenggaranya PIT 2026. Menurutnya, kegiatan ilmiah seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman tenaga kefarmasian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan regulasi, sekaligus mendorong pelayanan yang semakin berkualitas.

Ia menegaskan bahwa pengawasan obat bukan hanya menjadi tanggung jawab BPOM. Apoteker dan seluruh tenaga kefarmasian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan mutu obat, mulai dari pengelolaan, penyimpanan, distribusi, hingga penyerahan kepada pasien.

Dalam kesempatan tersebut, Riyanto menyoroti pentingnya implementasi Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain serta Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam memastikan pengelolaan dan distribusi obat dilaksanakan sesuai standar sehingga mutu, keamanan, dan keabsahan obat tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat.

Riyanto juga mengingatkan pentingnya penerapan rantai dingin (cold chain) untuk produk biologi, vaksin, dan sediaan termolabil. Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan penyerahan obat, termasuk larangan menyerahkan obat keras tanpa resep dokter, harus menjadi perhatian seluruh tenaga kefarmasian.

Penguatan manajemen mutu di fasilitas pelayanan kefarmasian juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

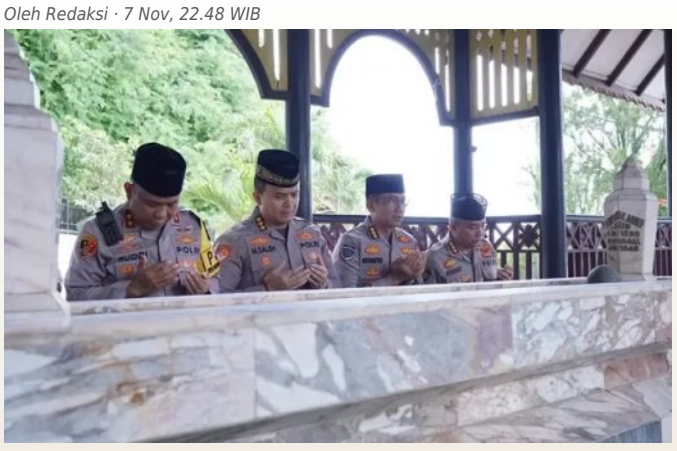
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Sambut Hari Pahlawan, Kapolda Aceh Ziarah ke Sejumlah Makam Tokoh Pahlawan

Oleh Redaksi · 7 Nov, 22.48 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Menyambut peringatan Hari Pahlawan ke-81, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan berziarah ke sejumlah makam tokoh pahlawan di Aceh, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sejumlah makam yang dikunjungi Kapolda Aceh meliputi makam Sultan Iskandar Muda di samping Pendopo Gubernur Aceh, makam Teuku Nyak Arif di Desa Meunasah Papeun, makam Laksamana Malahayati di Desa Lamreh, serta makam Teungku Chik di Tiro di Gampong Meureu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Kapolda Aceh mengatakan, ziarah tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mengenang sekaligus meneladani …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Petisi Ahli: Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.24 WIB



BANDA ACEH -Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan amar putusan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satunya adalah Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka.

"Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan ditaati oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Tidak boleh ada pihak yang merasa berada di atas hukum," kata Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni Nasution, dikutip Minggu 8 November 2026.

Menurut Pitra, prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Petisi Ahli menilai bahwa penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan merupakan bagian penting dalam menjaga kewibawaan hukum, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.

"Perbedaan pandangan Politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan putusan pengadilan. Apabila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka seluruh pihak wajib menghormati konsekuensi hukumnya sesuai dengan amar putusan tersebut," kata Pitra.

Petisi Ahli juga mengingatkan bahwa setiap putusan pengadilan harus dipahami secara utuh, termasuk objek sengketa, pertimbangan hukum, amar putusan, serta akibat hukum yang secara tegas ditentukan oleh pengadilan.

Karena itu, persoalan pembatalan Surat Keterangan yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan ataupun dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan hukum yang melampaui isi putusan pengadilan.

"Siapa pun pejabatnya, apa pun jabatannya, hukum harus tetap menjadi panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Pitra.

Petisi Ahli mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, penyelenggara negara, partai politik, dan masyarakat, untuk tetap menghormati independensi kekuasaan kehakiman serta tidak membangun opini yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai substansi putusan pengadilan.

"Putusan pengadilan yang telah inkrah bukan sekadar untuk diperdebatkan, melainkan wajib dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketaatan terhadap hukum merupakan ukuran kedewasaan demokrasi dan penghormatan terhadap konstitusi," pungkas Pitra.

NASIONAL

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.27 WIB



Foto ini memperlihatkan mantan Presiden Terbaik di muka bumi ini, Joko Widodo alias Jokowi sedang mengenakan kemeja batik dan peci hitam sambil memegang serta memperlihatkan

BANDA ACEH - Sikap mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan keberatan untuk melakukan uji laboratorium forensik (labfor) ulang terhadap fisik ijazah S1 miliknya di persidangan mengundang tanya tanya publik.

Salah satunya disuarakan oleh penulis buku biografi Kamaruddin Simanjutak, Hojot Marluga, dikutip Minggu 8 November 2026.

"Kasus ijazah Jokowi mirip-mirip kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Kasus tersebut akhirnya terungkap terang benderang setelah dilakuan autopsi ulang," kata Hojot.

Padahal jenazah Yosua sebelumnya sudah diautopsi di RS Polri, namun keluarga yang curiga atas kematiannya tak berani bersuara karena adanya tekanan.

Berkat desakan tim pengacara yang dikoordinatori almarhum Kamaruddin Simanjuntak, autopsi ulang pun akhirnya dilakukan. Demi keadilan untuk semua pihak, makam yang sudah tertutup tanah harus dibongkar kembali.

"Akhirnya dari autopsi ulang itulah pintu masuk untuk mengungkap seluruh kebusukan yang coba disembunyikan Ferdy Sambo terbuka," kata Hojot.

Menurut Hojot, logika yang sama seharusnya berlaku untuk menyelesaikan polemik ijazah yang hingga kini masih menyisakan perdebatan di ruang publik.

"Demi keadilan, ijazah tersebut perlu diuji ulang di Labfor, karena pengujian sebelumnya dilakukan pada era Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang kini berstatus tersangka dalam kasus penyadapan Presiden," kata Hojot.

Hojot menegaskan bahwa orang yang yakin ijazahnya asli pasti setuju menyambut pengujian ulang secara terbuka di depan hakim.

"Sebab pihak yang benar tidak pernah takut diperiksa," kata Hojot.

Diketahui, saat ini LSP dan tiga perwira tinggi Polri berstatus tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Jika institusi di bawah komandonya saja diduga bisa menyadap Presiden secara ilegal, mengapa publik harus percaya begitu saja pada hasil Labfor di era kepemimpinannya?" pungkas Hojot.

ACEH

Bupati Syech Muharram Apresiasi Pengurus PGRI, Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh Besar

Oleh Redaksi · 7 Nov, 18.26 WIB

KOTA JANTHO – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pengurus Cabang (PC) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang baru dilantik untuk masa bakti 2025–2030.

Menurut Syech Muharram, PGRI memiliki peran penting sebagai wadah perjuangan sekaligus rumah bagi para guru dalam memperjuangkan kepentingan profesi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

"Organisasi PGRI sangatlah penting dan harus menjadi rumah sekaligus benteng bagi para guru dalam memperjuangkan kepentingan profesi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Besar," ungkap Syech Muharram saat membuka Konferensi Kerja (Konker) II PGRI Aceh Besar Tahun 2026 yang dirangkai dengan pelantikan Pengurus Cabang (PC) PGRI se-Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, Gampong Niron, Kecamatan Sukamakmur, Sabtu (7/11/2026).

Pada kesempatan itu, Syech Muharram mengatakan kekuatan PGRI sangat bergantung pada kepedulian dan kebersamaan seluruh pengurus. Menurutnya, organisasi tidak akan berkembang apabila setiap anggota hanya mengandalkan struktur kepengurusan tanpa disertai tanggung jawab bersama.

"Sehebat apa pun kita membangun benteng atau rumah, tanpa adanya kepedulian, jangan berharap organisasi itu akan maju. Peduli itu sangat penting. Kami berharap seluruh pengurus PGRI memiliki kepedulian terhadap organisasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan para guru agar memiliki semangat pantang menyerah dalam menjalankan tugas pendidikan. Kekompakan dan persatuan, kata dia, menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan.

Selain persoalan organisasi, Syech Muharram turut menyinggung pelaksanaan program Beut Kitab Bak Sikula yang menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda.

Menurutnya, program tersebut memiliki keterkaitan dengan upaya mempersiapkan generasi emas 2045. Karena itu, dukungan para guru sangat diperlukan dalam pelaksanaannya.

"Program Beut Kitab Bak Sikula ini merupakan bagian dari upaya membentuk karakter dan akhlak anak-anak kita. Kita tidak hanya ingin melahirkan generasi yang cerdas, tetapi juga memiliki dasar agama dan akhlak yang baik," katanya.

Selain itu, Bupati Aceh Besar juga mengungkapkan wacana pengembangan sekolah dengan sistem pembelajaran khusus bagi anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi atau IQ di atas rata-rata.

Ia menjelaskan, konsep tersebut tidak dilakukan dengan membangun sekolah baru, melainkan memanfaatkan sekolah yang sudah ada dengan menerapkan sistem pembelajaran khusus sesuai kemampuan peserta …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolri Didesak Buka Daftar Korban Penyadapan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.50 WIB



BANDA ACEH -Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang harus diusut tuntas hingga ke aktor utamanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan, siapa pun pihak yang terlibat dalam praktik penyadapan ilegal tersebut harus dimintai pertanggungjawaban tanpa terkecuali.

"Ini kejahatan luar biasa. Mau siapapun yang terlibat harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya dan aktor utamanya," ujar Jansen lewat akun X miliknya, dikutip Minggu, 8 November 2026.

Ia bahkan meminta Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto mengumumkan ribuan nama yang diduga menjadi target penyadapan kepada publik.

Jansen menegaskan, apabila namanya termasuk dalam daftar pihak yang disadap, ia tidak akan tinggal diam. Ia mengancam akan menempuh gugatan perdata terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan pihak-pihak terkait.

"Kalau sampai ada namaku, aku akan gugat perdata Pak LSP dkk. Minta ganti rugi! Enak saja kita disadap ilegal. Mau dikabulkan atau tidak oleh hakim, urusan nanti," tegasnya.

Jansen menilai praktik penyadapan tanpa dasar hukum tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hak privasi dan perlindungan hukum warga negara.

NASIONAL

Said Didu: Dugaan Penyadapan Prabowo Jadi Puncak Perlawanan Oligarki

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.24 WIB



BANDA ACEH -Aktivis Muhammad Said Didu mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan perlawanan kelompok oligarki yang kepentingannya mulai terusik oleh langkah pemerintah.

Dalam orasinya pada Aksi Rakyat Bela Indonesia di kawasan Masjid Agung Kampus Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Minggu pagi, 8 November 2026, Said Didu menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai puncak dari perlawanan terhadap Prabowo.

Menurutnya, kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya negara tidak akan tinggal diam ketika kepentingannya mulai disentuh.

"Dan itulah saya mengatakan pada saat Pak Prabowo menyentuh maka saya yakin serangan akan datang," kata Said Didu.

Ia kemudian menyinggung dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang dikaitkannya dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Karena Prabowo langsung menyerang kekuasaan mereka, maka datanglah sandiwara yang dilakukan oleh mantan Kapolri untuk menyadap Presidennya. Itu adalah puncak dari segalanya," ujarnya.

Said Didu menilai, persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks perjuangan mempertahankan kedaulatan negara dari pengaruh kelompok berkepentingan.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak takut menyuarakan sikap terhadap berbagai persoalan yang dinilai merugikan bangsa.

NASIONAL

Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang Termasuk Tito Karnavian, Bahas Apa?

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.29 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) hari ini. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Momen pertemuan tersebut diketahui dari unggahan akun YouTube Sekretariat Presiden. Dalam pertemuan itu, sejumlah mantan Kapolri tampak hadir bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri.

Beberapa mantan Kapolri yang terlihat hadir di antaranya Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti.

Selain itu, hadir pula Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan Jenderal (Purn) Suroyo Bimantoro.

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mereka di antaranya Astamaops Komjen Roycke Harry Langie dan Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat.

Kemudian, tampak hadir Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, Kadiv Propam Polri Irjen Nazly Harahap, Kabaintelkam Komjen Dedy Kusuma Bakti, serta Kabaharkam Komjen Herry Heryawan.

Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri tersebut berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, dengan turut melibatkan pimpinan Polri dan sejumlah pejabat pemerintahan.

NASIONAL

Gibran, Kaesang, dan Bobby Nasution Tak Masuk Sasaran Penyadapan

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.46 WIB



Gibran Rakabuming Raka (kiri), Kaesang Pangarep (kanan), dan Bobby Nasution (tengah). Dinasti Geng Solo yang kerap disebutkan di media sosial. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting mengatakan, dari 6.000 nomor telepon seluler yang diduga menjadi sasaran penyadapan illegal, ternyata tidak menyasar nama-nama lingkaran dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Di antaranya Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Pratikno, dan sejumlah tokoh lainnya.

“Tidak ada orang-orang lingkaran dekat Jokowi,” kata Ginting kepada wartawan, Sabtu 7 November 2026.

Sebaliknya, Ginting menyoroti munculnya nama-nama orang yang selama ini dikenal berseberangan atau kritis terhadap Jokowi.

“Ada tuh yang kontra dengan Jokowi misalnya. Itu ada apa? Kemudian Wapres Gibran juga tidak ada,” kata Ginting.

Ginting menilai persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai perkara hukum biasa. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan nasional dan berpotensi menjadi perhatian internasional.

“Dunia juga melihat ini. Ini bukan isu nasional lagi, tetapi isu internasional,” kata Ginting.

Ginting bahkan memperkirakan adanya sekitar 14 perwira tinggi yang berpotensi terseret dalam perkara tersebut.

Ia menduga sejumlah perwira tinggi itu bisa menjadi tersangka apabila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan mereka.

“Saya sampai menghitung ketika tanggal 1, ini ada sekitar 14 perwira tinggi yang akan terseret, yang saya duga akan menjadi tersangka,” kata Ginting.

NASIONAL

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.33 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah tidak lagi memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin.

Setidaknya ada tiga catatan penting terkait persoalan tersebut, mulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 hingga persoalan pemenuhan syarat kelulusan.

"Yang kedua, pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024 dan pemilu legislatif hingga pilkada tahun 2024 juga banyak diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, dikutip Sabtu, 7 November 2026.

"Ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Hasto lantas menyimpulkan bahwa gugurnya aspek-aspek mendasar tersebut secara otomatis menghilangkan legitimasi kepemimpinan yang bersangkutan.

"Tidak hanya proses dari saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi," tegas Hasto.

Menindaklanjuti hal tersebut dalam jalur legislatif, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP terus menjalin dialog Politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Ia menambahkan, isu penyadapan yang marak belakangan ini turut memperkuat desakan publik.

"Tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Hasto.

Saat ditanya mengenai kesamaan pandangan dari delapan fraksi di parlemen, Hasto mengonfirmasi bahwa komunikasi politik antar fraksi terus berjalan secara intensif.

"Ya proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya," pungkas Hasto.

NASIONAL

Bareskrim Bantah Isu Tito dan Idham Azis Ditangkap terkait Penyadapan Prabowo: Tidak Benar

Oleh Redaksi · 8 Nov, 11.09 WIB



BANDA ACEH - Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai penangkapan mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis.

Dalam unggahan yang viral, keduanya disebut-sebut menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“Infonya tidak benar,” kata Asep saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai Politik, aktivis, hingga media

NASIONAL

Heboh Mendagri dan Eks Kapolri Idham Azis Dikabarkan Ditangkap, Bareskrim Buka Suara!

Oleh Redaksi · 8 Nov, 10.25 WIB



BANDA ACEH - Viral di media sosial yang menyebut bahwa Mendagri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis ditangkap dan jadi tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Menanggapi kabar yang beredar di media sosial tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dengan tegas menyatakan bahwa informasi itu tidak benar.

“Infonya tidak benar,” kata Komjen Asep Safrudin saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Ketiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep.

Selain terhadap Presiden Prabowo, dugaan penyadapan itu dilakukan terhadap elite partai Politik, aktivis hingga media.

NASIONAL

Penahanan Listyo Sigit Prabowo Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Oleh Redaksi · 8 Nov, 08.38 WIB



Foto ini menampilkan Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi dalam setelan jas biru dan peci hitam berdiri di samping mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang menjadi Tersangka kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto sedang mengenakan seragam dinas upacara

BANDA ACEH - Penahanan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo gara-gara kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi pukulan berat bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Demikian pandangan analis Politik Saiful Huda Ems, dikutip Minggu 8 November 2026.

"Sampai-sampai di masa Kapolri LSP, Mabes Polri seperti ada dua Satu di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan dan satunya lagi di Solo," kata Saiful.

Akibat hubungannya yang sangat dekat dengan Jokowi, kata Saiful, wajar jika kemudian meyakini Polri era LSP masa terburuk dalam sejarah.

"Karena Jokowi sering menggunakan institusi Polri untuk kepentingan keluarganya," kata Saiful.

Beruntung, setelah hampir enam tahun memimpin korps Bhayangkara, LSP digantikan oleh Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Bahkan orang-orang LSP dipreteli satu-satu, dimutasi kesana kemari," kata Saiful.

Namun sayangnya, lanjut Saiful, LSP berhasil memindahkan alat sadap tercanggih dari Mabes Polri ke rumah dinas anak buahnya.

"Dengan alat canggih itu, LSP menyadap Presiden Prabowo Subianto dan para pejabat negara, termasuk para elite partai dan tokoh-tokoh oposisi," kata Saiful.

ACEH

Bupati Aceh Barat Sidak LPG 3 Kg, Pedagang Nakal Terancam Ditindak

Oleh Aceh Barat · 7 Nov, 15.49 WIB



Bupati Aceh Barat meninjau langsung ketersediaan tabung gas LPG 3 kg untuk memastikan pasokan aman bagi masyarakat,FOTO/HAI

MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM bersama Polres Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penjualan LPG bersubsidi 3 kilogram di sejumlah titik, termasuk Pasar Bina Usaha, Meulaboh, Sabtu (7/11/26).

Sidak tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait dugaan penjualan LPG 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dari hasil pemantauan, ditemukan LPG 3 kg dijual sekitar Rp20.000 per tabung. Namun, pemerintah juga menerima laporan adanya pedagang yang menjual hingga Rp35.000 bahkan Rp40.000 per tabung.

"Memang tadi ditemukan harga sekitar Rp20.000, tetapi ada laporan penjualan di atas Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung," kata Tarmizi.

Ia mengungkapkan, pemerintah sebelumnya telah memutus kerja sama dengan salah satu agen yang diduga terlibat dalam penjualan LPG seharga Rp40.000 per tabung setelah kasus tersebut viral di media sosial dan disertai bukti rekaman.

Tarmizi menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan bersama kepolisian, termasuk melalui pemantauan tertutup untuk mengungkap praktik penjualan di atas ketentuan.

"Jika ditemukan bukti penjualan di atas ketentuan, tentu akan kita tindak sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia juga meminta keuchik dan aparatur gampong ikut mengawasi distribusi LPG serta mengimbau masyarakat melaporkan langsung dugaan pelanggaran kepada pemerintah daerah, Satpol PP maupun kepolisian agar segera ditindaklanjuti.

Selain LPG, tim gabungan turut memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha. Harga cabai merah terpantau berkisar Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Wali Kota Sabang Raih Penghargaan Indonesia Future Figure Award 2026

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.48 WIB



SABANG – Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, meraih penghargaan Indonesia Future Figure Award 2026 atas pencapaian di bidang inovasi pelayanan publik.

Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, yang hadir mewakili Wali Kota dalam malam penganugerahan di Harris Hotel & Residences Sunset Road, Bali, Jumat (6/11/2026) malam.

Zulkifli meraih penghargaan kategori Best Figure Mayors 2026, dengan subkategori Outstanding Public Service Innovation. Penghargaan yang diselenggarakan ONE Magazine Indonesia tersebut mengusung tema “Prestasi untuk Negeri” sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh, kepala daerah, pimpinan perusahaan, BUMN/BUMD, serta unsur legislatif yang dinilai memberikan kontribusi di berbagai sektor.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Sabang, khususnya bagi Bapak Wali Kota. Kami tentu mengapresiasi penghargaan ini dan berharap dapat menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus memberikan yang terbaik bagi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id
Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

7 BERITA

EKONOMI

Ini Aturan Pesangon PHK Terbaru 2026, Cek Besaran Berdasarkan Masa Kerja

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.21 WIB



BANDA ACEH -Aturan pesangon PHK terbaru 2026 resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini memuat ketentuan pemberian uang pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan masa kerja.

DPR RI sebelumnya telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Mengutip laman resmi DPR RI, pembentukan undang-undang ketenagakerjaan terbaru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja, pemberi kerja, pengusaha, dan pemerintah. Regulasi tersebut juga disusun untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional dengan pelindungan yang lebih kuat bagi pekerja.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah hak pekerja ketika mengalami PHK. Berdasarkan Pasal 232 ayat (2), pemberian uang pesangon ditentukan berdasarkan lama masa kerja sebelum pekerja terkena PHK.

Besaran Pesangon PHK Berdasarkan Masa Kerja

Pasal 232 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur besaran uang pesangon yang menjadi hak pekerja ketika mengalami PHK. Ketentuan tersebut menetapkan besaran pesangon mulai dari satu bulan upah hingga sembilan bulan upah, bergantung pada masa kerja pekerja.

Berikut rincian besaran uang pesangon berdasarkan masa kerja:

Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah.

Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah.

Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah.

Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah.

Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah.

Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah.

Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah.

Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah.

Masa kerja 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah.

Dengan ketentuan tersebut, pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih berhak memperoleh uang pesangon sebesar sembilan bulan upah.

Ketentuan Uang Penghargaan Masa Kerja

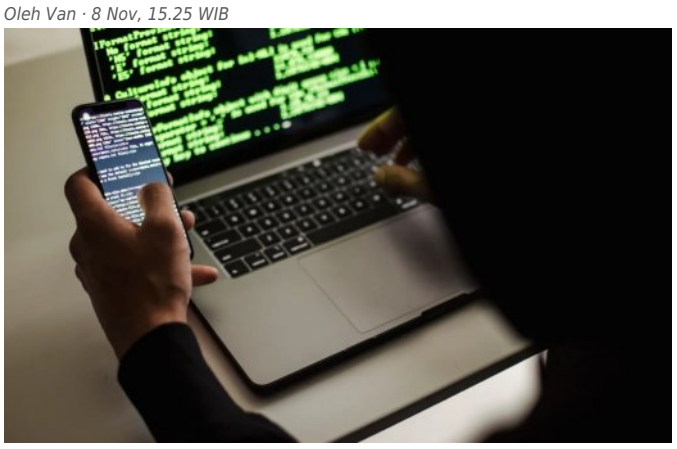
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Awas! Akun Saham Dibobol, Saham Investor Bisa Dijual Tanpa Izin dan Uangnya Dialihkan

Oleh Van · 8 Nov, 15.25 WIB



Tetap waspada terhadap ancaman keamanan siber di dunia digital.

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingatkan investor ritel untuk memperketat keamanan rekening efek dan rekening dana nasabah (RDN).

Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya kasus pembobolan akun saham yang masih terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy dalam keterangan resminya pada Minggu, (7/11/2026) mengungkapkan pembobolan akun dapat membuat saham milik investor dijual tanpa izin.

Dana hasil penjualan kemudian dialihkan untuk membeli saham lain yang memiliki likuiditas lebih rendah.

“Jadi mereka membobol akun teman-teman, kemudian saham-saham yang bagus dijual, hasil penjualan dibeliin saham-saham yang kurang bagus, yang di mana di sisi sebelahnya adalah temannya dia, di mana uang itu akhirnya berpindah-pindah-pindah,” kata Irvan.

Menurutnya, aksi tersebut tidak selalu dilakukan oleh satu orang. Dalam sejumlah kasus, pembobolan melibatkan komplotan yang bekerja sama untuk memindahkan dana hasil transaksi ke pihak lain.

Irvan menjelaskan, pelaku biasanya mengambil alih akses akun investor terlebih dahulu.

Setelah berhasil masuk, mereka menjual saham-saham yang memiliki fundamental atau kinerja baik.

Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk membeli saham lain yang kurang likuid.

Transaksi itu diduga menjadi bagian dari skema pemindahan dana antarpihak dalam komplotan.

“Pembobolan akun nasabah yang mengakibatkan saham nasabah dijual, uangnya dipakai untuk membeli saham lain di mana ini sifatnya adalah komplotan, bukan individual,” paparnya.

Modus tersebut membuat investor berpotensi mengalami kerugian karena saham dalam portofolionya dapat berpindah tanpa persetujuan.

Sementara itu, transaksi pembelian saham lain membuat aliran dana semakin sulit ditelusuri.

BEI pun meminta investor tidak menganggap remeh keamanan akun perdagangan saham, termasuk perangkat elektronik yang digunakan untuk mengakses aplikasi sekuritas.

Menurut Irvan, salah satu penyebab pembobolan akun adalah kelalaian investor dalam menjaga informasi akses.

Penggunaan kata sandi yang mudah ditebak atau tidak pernah diperbarui dapat membuka peluang bagi pelaku untuk mengambil alih akun.

Selain itu, membagikan password kepada orang lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Orang yang diberi akses tidak selalu berasal dari lingkungan yang jauh. Dalam beberapa kasus, investor justru membagikan kata sandi kepada orang terdekat, seperti asisten pribadi, sekretaris, pacar, hingga pasangan.

Risiko tersebut bahkan dapat berlanjut setelah hubungan pribadi berakhir. Mantan pacar atau mantan pasangan yang sebelumnya mengetahui informasi akses masih berpotensi menyalahgunakannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

BEI Perkuat Ekosistem Pasar Modal melalui Sejumlah Inisiatif Strategis

Oleh Hamdani · 7 Nov, 11.16 WIB

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar serangkaian inisiatif strategis sepanjang pekan pertama November 2026 untuk memperkuat ekosistem pasar modal Indonesia. Langkah tersebut mencakup pengembangan perusahaan menuju penawaran umum perdana saham (IPO), peningkatan transparansi dan tata kelola perusahaan, serta perluasan literasi dan inklusi investasi masyarakat.

Sejumlah program yang dilaksanakan meliputi peluncuran Go Public Academy for SMEs, penyelenggaraan CEO Networking 2026, penyempurnaan keterbukaan informasi kepemilikan saham, hingga Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026.

Pada Senin (2/11/2026), BEI bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PT Surveyor Indonesia, serta sejumlah perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman sekaligus meluncurkan Go Public Academy for SMEs di Main Hall BEI.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang melalui RISE to IPO yang berfokus pada edukasi, peningkatan kapasitas, dan pendampingan perusahaan menuju IPO. Sejak 2025, program ini telah menjangkau 281 perusahaan di lima kota, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bandung.

Melalui inisiatif tersebut, BEI mendorong perusahaan memperkuat tata kelola, kesiapan keuangan, transparansi, dan daya saing agar mampu memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang.

Pada tanggal yang sama, BEI juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-00160/BEI/11-2026 tentang Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham. Ketentuan baru ini mengatur publikasi informasi kepemilikan saham di atas 1 persen yang dilengkapi status pemegang saham sebagai Pengendali maupun Afiliasi Pengendali.

Informasi tersebut akan dipublikasikan secara bulanan melalui situs web BEI. Penyempurnaan ini diharapkan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai struktur dan konsentrasi kepemilikan saham sekaligus menjadi referensi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.

Selanjutnya, pada Selasa (3/11/2026), BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan CEO Networking 2026 di Raffles Hotel Jakarta.

Mengusung tema “Transforming Challenges into Value: Driving Growth and Increasing Trust through Transparency”, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 400 peserta dari kalangan pimpinan Perusahaan Tercatat dan pemangku kepentingan pasar modal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Bank Aceh Umumkan Peserta Lolos TPA Rekrutmen Calon Karyawan

Oleh Redaksi · 7 Nov, 12.00 WIB

BANDA ACEH - Hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dalam rangkaian Rekrutmen Calon Karyawan Bank Aceh resmi diumumkan.

Peserta yang dinyatakan lolos berhak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

Pengumuman hasil seleksi disampaikan secara individual kepada masing-masing peserta melalui dua kanal resmi, yakni surat elektronik (e-mail) yang didaftarkan saat pendaftaran serta akun e-Recruitment pada Portal Assessment Center LPPI.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Pengangguran Aceh Tembus 152 Ribu Orang pada 2026

Oleh Van · 8 Nov, 16.01 WIB



Data BPS menunjukkan lonjakan angka pengangguran di Aceh yang kini mencapai 152 ribu orang.

BANDA ACEH – Persoalan ketenagakerjaan di Aceh masih menjadi pekerjaan rumah serius. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat sekitar 152 ribu orang belum memperoleh pekerjaan hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026, jumlah penduduk yang bekerja di Aceh mencapai 2,52 juta orang dari total 2,67 juta orang angkatan kerja. Sementara itu, sekitar 152 ribu orang masih berstatus sebagai pengangguran.

Agus menjelaskan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh pada Agustus 2026 berada di angka 5,70 persen. Dengan kata lain, dari setiap 100 orang yang masuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar lima hingga enam orang yang belum memiliki pekerjaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam keterangan pers resmi statistik BPS Aceh yang ditayangkan melalui kanal YouTube BPS Aceh. Pemaparan itu diketahui pada Jumat, 6 November 2026.

BPS juga melaporkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Aceh pada Agustus 2026 mencapai 4,22 juta orang. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 2,67 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja, sedangkan 1,55 juta orang lainnya merupakan penduduk bukan angkatan kerja.

Di sisi lain, kondisi pasar tenaga kerja Aceh justru memperlihatkan perkembangan yang perlu mendapat perhatian. Jika dibandingkan dengan Agustus 2025, jumlah penduduk yang berhasil terserap dalam pekerjaan mengalami penyusutan sekitar 43 ribu orang.

Pada periode yang sama, TPT Aceh juga mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Agus menyebutkan, peningkatan angka pengangguran tersebut tidak terlepas dari pengaruh bencana yang melanda sejumlah wilayah menjelang penghujung 2025.

"Peningkatan pengangguran tersebut turut dipengaruhi dampak bencana yang terjadi menjelang akhir 2025," kata Agus.

Data BPS turut memperlihatkan adanya kesenjangan pengangguran berdasarkan jenis kelamin. Pada Agustus 2026, TPT laki-laki tercatat sebesar 4,56 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran perempuan yang mencapai 7,59 persen.

Sementara itu, berdasarkan lokasi tempat tinggal, pengangguran di kawasan perkotaan tercatat konsisten lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesempatan kerja di Aceh tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga distribusi peluang kerja antarkelompok masyarakat dan wilayah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

APKLI Merah Putih: Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Oleh Redaksi · 8 Nov, 13.37 WIB



BANDA ACEH -Roda ekonomi Usaha Kecil Menengah Pedagang Kaki Lima (UKM PKL) membutuhkan stabilitas nasional yang kokoh, demikian juga ekonomi Indonesia.

Namun faktanya, selama dua tahun terakhir terjadi pasang surut gelombang ekonomi rakyat kecil. Bahkan omzet dan pendapatan UKM PKL menurun di semua kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, Dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI MP), Ali Mahsun usai melantik kepengurusan DPP APKLI MP periode 2026-2031 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, Minggu 8 November 2026.

Ali melihat bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo cs merupakan dalang nyaris terpuruknya ekonomi Indonesia

"Untuk itu para pelaku penyadapan harus diusut tuntas, dan dihukum mati, kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak 'stagnan', tidak stabil. Bahkan hampir terpuruk," kata Ali.

Lebih dari itu, kata Ali, kasus penyadapan tersebut telah mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

APKLI MP juga mendukung Presiden Prabowo menghukum seberat-beratnya para komparador pengeruk kekayaan SDA Indonesia, yang semestinya menjadi jaminan rakyat dan bangsa ini hidup sejahtera secara berkeadilan

Dalam kesempatan yang sama disalurkan "Sedekah Keselamatan Nusantara Indonesia". Yaitu berupa Beasiswa Anak UKM PKL Indonesia, untuk siswa SD sebesar Rp500 ribu, siswa SMP Rp600 ribu, dan siswa SMA Rp750 ribu.

Kedua, penyaluran bantuan modal usaha ke PKL kopi keliling dan asongan masing-masing sebesar Rp1 juta. Ketiga, penyaluran santunan yatim piatu sebesar Rp250 ribu per anak.

Penyerahan bantuan ini sebagai simbol kepedulian sosial dari organisasi terhadap sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Selain itu, selepas pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan agenda rapat kerja (Raker). Sesi Raker ini fokus pada pemaparan program kerja dari masing-masing bidang, sinkronisasi lintas sektor, hingga perumusan dan penetapan hasil kerja organisasi.

Hasil Raker DPP APKLI 2026-2031 akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI MP tahun 2026 pada 9 Desember 2026 di Jakarta.

EKONOMI

IHSG Sempat Ambruk 3,78 Persen, 5 Saham Ini Justru Terbang hingga 190 Persen!

Oleh Van · 7 Nov, 20.05 WIB

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup pekan pertama November 2026 dengan koreksi 0,13 persen ke level 5.050,429. Di tengah gejolak pasar, sejumlah saham justru melonjak hingga lebih dari 100 persen.

Pergerakan indeks pada periode 2–6 November 2026 berlangsung tajam. IHSG sempat anjlok 3,78 persen pada Selasa, 3 November, sebelum kembali menguat dan menembus level 5.000.

Berdasarkan statistik mingguan Bursa Efek Indonesia (BEI), posisi IHSG turun dari 5.057,050 pada pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar juga menyusut 1,34 persen menjadi Rp8.744 triliun atau berkurang sekitar Rp118 triliun.

Rekap IHSG Sepekan: Sempat Jatuh, Lalu Bangkit

Pada Senin, 2 November 2026, IHSG mengawali pekan dengan penguatan 0,79 persen ke level 5.096,83. Sentimen positif datang dari surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2026 yang melampaui perkiraan pasar.

Namun, pada Selasa, 3 November, indeks berbalik anjlok 3,78 persen ke posisi 4.904,29. Tekanan pasar berlanjut di tengah kekhawatiran investor terhadap prospek pasar modal Indonesia.

Rabu, 4 November, IHSG hanya mampu naik tipis 0,32 persen ke level 4.919. Pemulihan lebih kuat terjadi pada Kamis, 5 November, ketika indeks melesat 2,25 persen menjadi 5.030,26.

Pada Jumat, 6 November, IHSG sempat bergerak di zona merah sebelum berbalik menguat 0,40 persen ke level 5.050,42. Meski demikian, kenaikan tersebut belum cukup menghapus koreksi sepanjang pekan.

Salah satu sentimen yang membayangi pasar adalah rencana MSCI mengonsultasikan kemungkinan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri atau standalone market. MSCI menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.

OJK juga mengakui ketidakpastian global, persepsi risiko investor, dan pengumuman MSCI turut memengaruhi pergerakan pasar modal domestik. Pemerintah dan regulator pun melanjutkan agenda reformasi transparansi untuk memperkuat kepercayaan investor.

5 Saham dengan Kenaikan Tertinggi Sepekan

Di tengah pelemahan IHSG, beberapa saham mencatatkan kenaikan harga yang jauh melampaui pergerakan indeks.

Berdasarkan statistik perdagangan mingguan BEI, berikut lima saham dengan penguatan tertinggi periode 2–6 November 2026:

• MKNT naik 190,91 persen ke Rp32 per saham.
• AIMS naik 125,96 persen ke Rp1.175 per saham.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

KTP Dicatut Orang Lain untuk Pinjol? Jangan Panik, Ini 7 Langkah untuk Melawan Teror Penagih

Oleh Van · 7 Nov, 15.04 WIB

JAKARTA — Penyalahgunaan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) dapat menimbulkan masalah serius bagi korbannya.

Seseorang bisa tiba-tiba menerima pesan penagihan, bahkan diteror debt collector, meski merasa tidak pernah mengajukan pinjaman.

Kondisi tersebut perlu ditangani dengan hati-hati. Korban sebaiknya tidak terburu-buru membayar tagihan atau menghapus pesan dari penagih sebelum mengamankan bukti.

Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan seluruh bukti, memeriksa riwayat kredit melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mengajukan pengaduan kepada pihak terkait.

Berikut sejumlah langkah yang dapat ditempuh ketika KTP diduga disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online dikutip dari YouTube Fintech.id Sabtu, (7/11/2026).

1. Kumpulkan Bukti Penyalahgunaan Data

Jangan langsung memblokir nomor penagih sebelum menyimpan bukti komunikasi. Dokumentasikan seluruh pesan, panggilan, dan ancaman yang diterima.

Beberapa bukti yang perlu disiapkan antara lain:

- Tangkapan layar pesan penagihan dan ancaman dari debt collector.

- Nomor telepon yang menghubungi serta identitas aplikasi pinjol yang disebutkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

OJK Bongkar Pelanggaran 7 Emiten, Ada Masalah Laporan Keuangan hingga Transaksi Afiliasi

Oleh Van · 8 Nov, 15.21 WIB



Logo resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terpasang di dinding.

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh emiten yang melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal. Sanksi tersebut berupa denda hingga peringatan tertulis, dengan nilai terbesar dikenakan kepada PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI).

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Khoirul Muttaqien dalam keterangan resminya pada Minggu, (7/11/2026), menjelaskan salah satu pelanggaran berkaitan dengan penyajian informasi aset dalam laporan keuangan ASLI.

"Pada LKTT 2024, LKT 2024 dan LKTT 2025, PT Asri Karya Lestari Tbk terdapat aset dengan nilai yang material yang tidak dapat diyakini keandalan nilai dan informasi atas aset tersebut berdasarkan dokumen pendukungnya," ungkap Khoirul.

Selain ASLI, enam emiten lain yang turut dikenai sanksi adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).

Pelanggaran yang ditemukan OJK beragam, mulai dari ketidakandalan informasi aset dalam laporan keuangan, ketidaksesuaian prosedur transaksi afiliasi dan material, hingga tidak diselenggarakannya rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

Atas pelanggaran tersebut, ASLI dikenai denda sebesar Rp1,35 miliar. Tiga anggota direksinya, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, juga dijatuhi denda Rp645 juta secara tanggung renteng.

Sementara itu, Akuntan Publik Arief Prima yang bertindak sebagai auditor laporan keuangan tahunan ASLI 2024 dikenai denda Rp107,5 juta.

Jika digabungkan, total denda yang berkaitan dengan perkara ASLI mencapai Rp2,1025 miliar.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada ADHI dan ADCP terkait perjanjian pinjaman pemegang saham atau shareholder loan.

Kedua perusahaan tersebut dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi sesuai ketentuan POJK Nomor 42/POJK.04/2020.

Masing-masing perusahaan dikenai denda Rp450 juta. Selain itu, dua penilai yang memberikan pendapat kewajaran setelah transaksi dilakukan, Toto Suharto dan Syaiful Hasan, masing-masing dikenai denda Rp65 juta.

Dengan demikian, total sanksi yang berkaitan dengan ADHI dan ADCP mencapai Rp1,03 miliar.

Pelanggaran berbeda ditemukan pada PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU).

Emiten tersebut dikenai denda Rp925 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material yang sekaligus merupakan transaksi afiliasi atas penerimaan pinjaman.

OJK menilai tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

KAMAKSI Desak Dirut KAI Bobby Rasyidin Mundur

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.15 WIB



BANDA ACEH -Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali menjadi sorotan publik. Terbaru, KPK menyita uang senilai Rp2 miliar dari Bobby Rasyidin, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Penyitaan tersebut dikonfirmasi Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat 6 November 2026. Bobby diketahui pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut ketika menjabat Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021–2025.

Perkembangan ini memunculkan perhatian serius terhadap aspek transparansi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan milik negara, terlebih karena Bobby saat ini menduduki posisi strategis sebagai pimpinan perusahaan transportasi publik nasional.

Ketua Umum DPP Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Joko Priyoski, mendesak Bobby Rasyidin bertanggung jawab moral dan kelembagaan dengan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama KAI.

Menurut Joko, penyitaan uang Rp2 miliar oleh KPK merupakan perkembangan hukum serius yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Pimpinan BUMN harus memiliki kepekaan terhadap persoalan integritas, kepercayaan publik, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

"Kami mendesak Bobby Rasyidin mundur secara legowo dari jabatan Direktur Utama KAI. Ini bukan semata-mata persoalan jabatan, melainkan menyangkut tanggung jawab moral, integritas kepemimpinan, dan kepercayaan publik terhadap perusahaan negara," kata Joko melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu 8 November 2026.

Ia menambahkan, KAI merupakan BUMN strategis yang mengemban mandat pelayanan transportasi masyarakat. Karena itu, kepemimpinannya harus terbebas dari persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, keraguan publik, maupun gangguan terhadap kredibilitas institusi.

"Jangan sampai persoalan hukum yang sedang didalami KPK justru menjadi beban bagi institusi KAI," kata Joko.

KAMAKSI juga meminta KPK mengusut secara menyeluruh asal-usul uang Rp2 miliar yang disita, tujuan pemberian, pihak-pihak yang berkaitan, serta kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain.

Berdasarkan perkembangan penyidikan, perkara digitalisasi SPBU diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp322,18 miliar berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kerugian tersebut terdiri atas pengadaan perangkat Automatic Tank Gauge (ATG) sebesar Rp193,75 miliar dan pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) sebesar Rp128,42 miliar.

KPK telah menahan tiga tersangka dalam perkara ini, yakni Elvizar, Dian Rachmawan, dan Weriza pada 4 Agustus 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

SMSI Aceh Besar dan PB IPAR Gelar Pelatihan Jurnalistik, Cetak Generasi Kritis di Era Digital

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.00 WIB

ACEH BESAR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar berkolaborasi dengan Pengurus Besar (PB) Ikatan Pemuda Aceh Besar (IPAR) menggelar Pelatihan Jurnalistik untuk Generasi Kritis di Hotel Permata Hati, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema "Mencetak Jurnalis Muda di Era Digital" tersebut menghadirkan pimpinan perusahaan media Beritamerdeka.net, Tarmilin Usman, sebagai pemateri.

Pelatihan ini diikuti kader-kader dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lintas sektor serta organisasi paguyuban di Kabupaten Aceh Besar. Para peserta merupakan delegasi masing-masing organisasi yang ingin meningkatkan kemampuan menulis, memahami dunia jurnalistik, serta memperkuat literasi media di tengah perkembangan teknologi informasi.

Dalam pemaparannya, Tarmilin menyampaikan bahwa generasi muda Aceh Besar memiliki potensi besar untuk menjadi jurnalis profesional dan berintegritas. Namun, potensi tersebut harus diiringi dengan komitmen untuk mematuhi regulasi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

"Menjadi jurnalis itu sebetulnya sangat mudah untuk dijalani dengan benar, asalkan kita konsisten mengikuti aturan-aturan yang ada," ujar Tarmilin di hadapan puluhan peserta.

Mantan Ketua PWI Aceh selama dua periode tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dan independensi dalam menyajikan informasi. Menurutnya, seorang jurnalis tidak boleh mencampuradukkan opini maupun sentimen pribadi ke dalam produk jurnalistik.

"Ketika menulis berita, tidak boleh ada unsur kebencian terhadap seseorang sehingga memicu niat buruk yang dituangkan ke dalam teks berita. Berita yang kita buat harus selalu berimbang dan didukung oleh sumber yang jelas serta dapat dibuktikan kebenarannya," tegasnya.

Lebih lanjut, Tarmilin menjelaskan bahwa profesi wartawan bukan sekadar kemampuan menulis, tetapi juga membutuhkan komitmen, keberanian, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, minat yang kuat serta keberanian untuk menyuarakan kebenaran menjadi modal penting bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia jurnalistik, terutama di tengah derasnya arus informasi pada era digital.

Melalui pelatihan ini, SMSI Aceh Besar dan PB IPAR berharap dapat melahirkan jurnalis-jurnalis muda yang memiliki kemampuan, wawasan, serta integritas dalam memproduksi karya jurnalistik yang sehat, edukatif, dan tepercaya.[]

LINGKUNGAN

Konflik Gajah dan Manusia di Aceh Tak Kunjung Selesai, 13 Sekolah di Bener Meriah Terpaksa Libur

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.23 WIB

BENER MERIAH – Konflik antara gajah liar dan manusia di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, kini semakin berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya mengancam keselamatan warga, konflik berkepanjangan ini juga mulai merampas hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan secara normal.Sedikitnya 13 sekolah terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi menyusul meningkatnya ancaman pergerakan kawanan gajah liar yang kerap melintasi kawasan permukiman, bahkan pada siang hari.Tim Advokasi Jaringan Gajah Nusantara (JGN) Aceh yang turun langsung ke lokasi pada Sabtu (7/11/2026) menemukan sejumlah sekolah dalam kondisi sepi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Bank Aceh Syariah Cetak Laba Rp373,62 Miliar per September 2026, Didorong Efisiensi dan Penguatan Dana Murah

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.00 WIB



Bank Aceh Syariah mencatatkan kinerja positif dan pertumbuhan stabil hingga September 2026. Capaian ini menunjukkan komitmen bank dalam menjaga kepercayaan nasabah.

BANDA ACEH - Kinerja keuangan Bank Aceh terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026.

Hingga periode September 2026, bank plat merah kebanggaan masyarakat Aceh ini berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp373,62 miliar.

Angka ini tercatat naik 1,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp368,53 miliar.

Berdasarkan laporan publikasi resmi Bank Aceh Syariah, pertumbuhan laba tersebut utamanya didorong oleh penerapan efisiensi operasional yang disiplin serta penguatan signifikan pada penghimpunan dana murah (Current Account Savings Account/CASA).

Hingga kuartal III 2026, dana murah bank ini tumbuh pesat sebesar 33,95 persen menjadi Rp21,96 triliun.

Efisiensi operasional tercermin jelas dari penurunan beban operasional lainnya sebesar 3,48 persen menjadi Rp1,04 triliun dari sebelumnya Rp1,08 triliun.

Selain itu, beban bagi hasil untuk pemilik dana investasi juga tercatat turun tajam sebesar 40,92 persen menjadi Rp218,44 miliar.

Penurunan beban ini secara langsung berkontribusi dalam menjaga margin keuntungan, sehingga pendapatan bank setelah distribusi bagi hasil tetap solid di angka Rp1,42 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Aceh Syariah mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 6,82 persen menjadi Rp21,99 triliun.

Sejalan dengan ekspansi bisnis tersebut, total aset bank juga tumbuh 4,27 persen menjadi Rp32,35 triliun.

Kualitas aset tetap terjaga dengan sangat baik. Rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross berhasil dipertahankan di level 2,67 persen, sementara NPF net berada di angka 1,26 persen.

Kedua rasio ini masih jauh di bawah batas aman 5 persen yang ditetapkan oleh regulator, yang mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan bank tetap terkendali.

Kesehatan perbankan juga ditopang oleh fondasi permodalan yang kuat. Modal inti Bank Aceh Syariah tumbuh 20,14 persen menjadi Rp3,96 triliun.

Penguatan ini mendorong rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) meningkat menjadi 20,88 persen dari sebelumnya 20,26 persen.

Dari aspek rentabilitas, kemampuan bank dalam menghasilkan laba menunjukkan kinerja yang stabil dan produktif.

Return on Assets (ROA) tercatat di level 1,66 persen, sementara Return on Equity (ROE) mengalami peningkatan menjadi 11,69 persen dari 11,66 persen pada periode sebelumnya.

Dengan fondasi kinerja keuangan yang solid selama sembilan bulan pertama tahun 2026 ini, Bank Aceh Syariah memiliki modal strategis untuk terus memperluas penyaluran pembiayaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pangdam IM dan Yusril Bakal Usut Tuntas Insiden di Pidie

Oleh Redaksi · 7 Nov, 14.17 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Pemerintah bersama TNI menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas insiden yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan 13 orang lainnya menjadi korban.

Komitmen itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dalam konferensi pers di Gedung VVIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Jumat (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Yusril didampingi Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M.

Yusril mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan bersama Komnas HAM perwakilan Aceh. Tim Komnas HAM dijadwalkan turun ke Aceh pada Minggu (8/11/2026).

Penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengungkap kronologi dan fakta peristiwa, termasuk memastikan penyebab luka yang dialami para korban.

Yusril juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Abzalul Riza (20). Ia berharap para korban lainnya segera pulih dan mendapatkan penanganan yang diperlukan.

Sementara itu, Pangdam IM menyampaikan bahwa Kodam Iskandar Muda tengah melakukan investigasi secara menyeluruh guna memastikan insiden tersebut ditangani secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait pengamanan di lokasi kejadian, Pangdam IM menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan awal dari prajurit yang bertugas, tidak seluruh personel membawa senjata api. Adapun munisi yang digunakan disebut berupa munisi hampa dan munisi karet.

Keterangan tersebut, kata dia, masih menjadi bagian dari proses pendalaman untuk mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi.

Pangdam IM juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan serta keamanan di Aceh.

Dalam kesempatan itu, Yusril turut menegaskan bahwa pemerintah menghormati tradisi masyarakat Aceh dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Insya Allah Paling Lambat Idul Fitri 2027 Indonesia Punya Wakil Presiden Baru

Oleh Redaksi · 7 Nov, 15.13 WIB



Wacana pemakzulan wakil presiden menjadi sorotan dalam dinamika politik terkini.

Oleh: Tarmidzi Yusuf((Kolumnis))

UTRA sulung Presiden ke-7 Indonesia Jokowi yang saat ini menjabat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar sedang berada di tepi jurang pemakzulan.

Gibran Rakabuming Raka tersandung kasus ijazah SMA atau sederajat.

Ia tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat seperti dipersyaratkan oleh Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No 90 Tahun 2023 yang menyebutkan calon presiden dan calon wakil presiden berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Gibran Rakabuming Raka lolos sebagai calon wakil presiden karena Putusan Mahkamah Konstitusi No 90 Tahun 2023 dan KPU tidak melakukan verifikasi terhadap surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah.

Terkini, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mengakibatkan Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Tidak punya ijazah SMA.

Situasi itu diperburuk dengan terbongkarnya skandal penyadapan oleh "Dewan Jenderal Polisi" pimpinan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Saat ini 4 (empat) jenderal polisi telah ditangkap dan dipenjarakan termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hanya seorang jenderal tidak ditahan karena alasan kesehatan. Rumornya ada lagi mantan Kapolri yang bakal jadi tersangka.

Kabarnya, Presiden Prabowo marah besar terhadap Listyo Sigit Prabowo yang disebut-sebut sebagai "komandan" operasi kudeta merangkak dalam skandal paling memalukan sejak Indonesia merdeka. Penyadapan terhadap Presiden RI.

Masih menurut info, Presiden Prabowo tambah marah besar setelah mengetahui tidak ada nama orang-orang Geng Solo yang disadap.

Kalaupun ada, seperti banyak disebut seorang ketua umum partai hanya untuk mengelabui publik.

Pasalnya, ketua umum partai yang dimaksud sering rapat di "markas" penyadapan di komplek rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Pekan ini masa reses DPR berakhir. Prediksi penulis DPR langsung tancap gas. DPR akan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Dirjen WHO, Menguatkan Tata Kelola Kesehatan Dunia?

Oleh Rut sw · 7 Nov, 14.15 WIB



Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam kemitraan strategis bersama WHO.

OALISI Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan Indonesia mengirimkan surat keberatan kepada Dewan Eksekutif WHO pada tanggal 5 November 2026 untuk menolak pencalonan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) WHO periode 2027–2032.

Menurut koalisi, Kemenkeu tidak memenuhi kriteria Resolusi EB97.R10 Dewan Eksekutif WHO yang mewajibkan Dirjen memiliki latar belakang teknis serta kompetensi kesehatan masyarakat yang kuat, mengingat ia berasal dari latar belakang perbankan dan keuangan.

Ditambah rekam jejak kepemimpinannya di Kementerian Kesehatan dinilai kurang mencerminkan independensi ilmiah, perlindungan tenaga kesehatan, serta tata kelola yang inklusif, karena dianggap lebih fokus pada investasi alat kesehatan berbiaya tinggi dibanding penanganan masalah dasar seperti TBC, kusta, pembatasan kritik tenaga kesehatan, sentralisasi kebijakan, dan pengelolaan data genomik.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pencalonan ini merupakan upaya memperkuat peran Indonesia dan memperjuangkan arsitektur kesehatan global yang lebih adil bagi negara berkembang.

Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir.

Dirjen WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, akan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Agustus 2027.

Budi Gunadi akan bersaing dengan mantan direktur Regional WHO untuk Eropa Hans Kluge yang diusulkan Belgia, mantan menteri kesehatan Qatar Hanan Al-Kuwari, dan Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur Hanan Balkhy.

Masih menurut Menlu, sistem multilateral saat ini belum terlalu berpihak pada negara-negara berkembang.

Karena itu, Indonesia terus mendorong penguatan sistem multilateralisme melalui langkah reformasi.

Pencalonan Menkes Budi untuk memimpin WHO merupakan penegasan bahwa Indonesia hendak berperan lewat tindakan nyata bagi perbaikan tata kelola kesehatan dunia.

Indonesia yang saat ini duduk sebagai anggota Badan Auditor PBB, sekaligus berniat memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi internasional, semangat yang sama ketika Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030 nanti.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

5 BERITA

LINGKUNGAN

Satu Kru Helikopter Pemadam Karhutla Masih Dalam Pencarian, Pilot Australia Selamat

Oleh Redaksi · 8 Nov, 19.16 WIB



BANDA ACEH -Satu kru warga negara Indonesia (WNI) masih dalam pencarian setelah helikopter Super Puma H-225 bernomor registrasi VH-HGM jatuh di perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu, 8 November 2026.

Sementara itu, dua awak berkewarganegaraan Australia berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, ketiga awak helikopter tersebut yakni Hugh Andrew John Page dan Michael John Betteridge, warga negara Australia, serta Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia.

Hugh Andrew John Page bertugas sebagai pilot, Michael John Betteridge sebagai pilot, sedangkan Yayan Supyansuri merupakan Helicopter Landing Officer (HLO).

"Berdasarkan laporan awal Kantor Basarnas Banjarmasin, dari tiga awak helikopter, ada dua yang telah ditemukan dalam kondisi sehat, yaitu Hugh Andrew John Page dan Michael John Betteridge. Sementara itu, satu orang awak lainnya yaitu Yayan Supyansuri masih dalam pencarian," kata Berton dalam konferensi pers secara virtual.

Berton memastikan BNPB memberikan perhatian penuh terhadap pencarian Yayan. Koordinasi dengan Basarnas dan unsur terkait juga terus dilakukan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

"Kami memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian tersebut. Seluruh unsur terkait telah berkoordinasi untuk mendukung proses pencarian dan pertolongan," ujarnya.

Adapun dua awak yang telah ditemukan dipastikan mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan penanganan medis sesuai kebutuhan.

Berdasarkan laporan Kantor SAR Banjarmasin, tim penyelamat diberangkatkan menuju lokasi kejadian pada pukul 13.10 WITA. Sebanyak 18 personel dikerahkan menggunakan kendaraan penyelamat dan kapal rigid inflatable boat (RIB).

Lokasi kecelakaan diperkirakan berjarak sekitar 141 kilometer dari Kantor SAR Banjarmasin atau 71 mil laut dari Dermaga SAR Basirih. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan memakan waktu sekitar lima jam.

Operasi pencarian melibatkan Kantor SAR Banjarmasin, TNI Angkatan Udara, Polri, Babinsa, serta masyarakat setempat. Sejumlah peralatan turut dikerahkan, antara lain RIB, kendaraan penyelamat, perahu karet, peralatan penyelaman, Aqua Eye, alat komunikasi, dan perlengkapan pendukung lainnya.

BNPB juga berkoordinasi untuk memastikan lokasi kejadian serta bangkai helikopter yang telah dievakuasi ke tepian sungai dapat diamankan guna mendukung pemeriksaan lebih lanjut.

Terkait penyebab kecelakaan, Berton menegaskan BNPB belum dapat menyimpulkan penyebab jatuhnya helikopter tersebut.

"Pada saat ini, penyebab kecelakaan belum dapat disimpulkan. Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum ada hasil pemeriksaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

PSMS Medan Hajar Persiraja 5-0, Puncak Klasemen Grup A Berpindah Tangan

Oleh Redaksi · 7 Nov, 22.02 WIB

BANDA ACEH, MEDAN – PSMS Medan tampil perkasa saat menjamu Persiraja Banda Aceh dalam lanjutan pekan kesembilan Pegadaian Championship Liga 2 2026/2027. Bermain di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu malam, 7 November 2026, tuan rumah menang telak 5-0 sekaligus mengambil alih posisi puncak klasemen sementara Grup A.

Hasil tersebut memperlihatkan perbedaan efektivitas permainan kedua tim. PSMS mampu memaksimalkan tekanan menjadi gol, sedangkan Persiraja kesulitan membendung serangan tuan rumah sepanjang pertandingan.

Sejak awal laga, Ayam Kinantan mengambil kendali permainan. Mereka terus menekan pertahanan Laskar Rencong dan memaksa tim tamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk meredam serangan.

Tekanan PSMS berbuah tiga gol pada babak pertama. Keunggulan tersebut menjadi modal bagi tuan rumah untuk mengendalikan pertandingan setelah turun minum.

Persiraja belum mampu menemukan cara untuk keluar dari tekanan. Sebaliknya, PSMS tetap bermain agresif dan kembali menambah dua gol pada babak kedua. Skor 5-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan ini tidak hanya memberikan tiga poin bagi PSMS, tetapi juga mengubah peta persaingan di papan atas Grup A.

Tambahan tiga poin membawa PSMS Medan mengoleksi 20 poin dari sembilan pertandingan. Mereka mencatatkan enam kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

PSMS kini menempati posisi pertama klasemen sementara Grup A. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena PSPS Pekanbaru membayangi di peringkat kedua dengan 18 poin dari delapan pertandingan.

PSPS masih memiliki satu laga lebih sedikit. Artinya, peluang mereka untuk kembali merebut posisi teratas masih terbuka, bergantung pada hasil pertandingan berikutnya.

Di sisi lain, kekalahan dari PSMS membuat Persiraja Banda Aceh tertahan di peringkat ketujuh. Tim berjuluk Laskar Rencong itu baru mengumpulkan 10 poin dari sembilan pertandingan.

Bagi PSMS, kemenangan dengan selisih lima gol menjadi suntikan kepercayaan diri dalam menjaga persaingan menuju fase berikutnya. Konsistensi akan menjadi pekerjaan penting bagi Ayam Kinantan, terutama karena PSPS masih memiliki peluang memangkas jarak poin.

Sementara itu, Persiraja perlu segera mengevaluasi performa setelah kekalahan besar tersebut. Dengan kompetisi yang masih berjalan, Laskar Rencong membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi dan menjaga peluang bersaing di Grup A.[]

LINGKUNGAN

Helikopter Jatuh di Sungai Barito Kalsel saat Padamkan Karhutla

Oleh Redaksi · 8 Nov, 13.30 WIB



BANDA ACEH - Helikopter jenis WB Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM jatuh di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel), saat misi pemadaman karhutla, Minggu (8/11/2026).

Helikopter tersebut merupakan armada sewaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mengangkut tiga kru.

"Telah terjadi kecelakaan heli WB super puma VH-HGM jatuh ke Sungai Barito," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan saat dikonfirmasi.

Berton membenarkan helikopter tersebut merupakan armada yang disewa BNPB. Dia menyebut ada tiga kru di dalam helikopter saat kecelakaan terjadi.

"Jumlah kru tiga orang," katanya.

Helikopter itu diduga jatuh saat mengambil air untuk misi pemadaman karhutla. Namun, Berton mengatakan BNPB masih mendalami aktivitas helikopter sebelum kecelakaan.

Kidzania 2026 di Karhutla, Nana Mirdad hingga Pandji Pragiwaksono Buka Suara

"Kalau lihat videonya demikian (sedang angkut air), nanti kami sampaikan setelah informasi utuh," tuturnya

LINGKUNGAN

Gelombang Kelvin dan Rossby Terpantau Aktif, Warga Diimbau Waspadai Cuaca Ekstrem

Oleh Redaksi · 8 Nov, 16.43 WIB



BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada periode 6–12 November 2026. Peringatan ini merujuk pada analisis terbaru BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan dinamika atmosfer saat ini memicu peningkatan curah hujan di Aceh. Gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial terpantau aktif. Daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan hujan.

“Suhu muka laut berkisar 29–31 derajat Celsius dengan kelembapan udara 70–100 persen. Kondisi ini menambah uap air dan meningkatkan pembentukan awan hujan di Aceh,” kata Nurlis di Banda Aceh.

Nurlis merinci dua kategori wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem tersebut, yaitu Hujan Lebat hingga Sangat Lebat (disertai petir dan angin kencang): Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bener Meriah.

Kemudian Hujan Intensitas Sedang (disertai petir dan angin kencang): Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Bireuen, Langsa, Lhokseumawe, Pidie Jaya, Subulussalam, dan Simeulue.

Masyarakat diminta mewaspadai dampak bencana hidrometeorologi sesuai tingkat kerawanan wilayah masing-masing. Dampak tersebut meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang.

“Masyarakat harus tetap tenang namun selalu waspada. Ambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap aman dan lancar,” tegas Nurlis.

Warga juga diminta terus memantau informasi cuaca terkini dari kanal resmi BMKG. Informasi resmi dapat diakses melalui media sosial @infobmkg_aceh, atau email . Nurlis mengingatkan warga agar tidak mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi. []

LINGKUNGAN

Belum Pulih Hampir Setahun, SMKN 1 Badiri Masih Belajar di Tenda Setelah Banjir Sumatera

Oleh Van · 8 Nov, 15.16 WIB



Meskipun dalam keterbatasan, semangat belajar tetap membara di sekolah darurat Kemendikdasmen.

TAPANULI TENGAH — Kondisi SMKN 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan menjelang setahun bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

Sorotan itu muncul setelah akun Threads @thesecrettttt12 mengunggah kondisi sekolah pada Sabtu, 7 November 2026. Unggahan tersebut menyebut bangunan sekolah masih belum pulih.

"SMK N 1 Badiri Tapanuli. Salah satu wilayah terdampak banjir Sumatera yg hingga detik ini masih belum pulih. Mereka sekolah masih dengan dinding & atap yg kalau diguyur hujan air masih tetap akan masuk," tulis akun tersebut.

SMKN 1 Badiri menjadi salah satu satuan pendidikan yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Kondisi sekolah dan kelanjutan kegiatan belajar mengajar menjadi perhatian setelah kerusakan bangunan akibat bencana.

SMKN 1 Badiri Sempat Lumpuh Setelah Banjir

Dalam laporan pada Jumat, 23 Januari 2026, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara menyebut aktivitas pendidikan di sekolah tersebut masih lumpuh total.

Bangunan sekolah tertimbun tanah akibat bencana sehingga kegiatan belajar tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Sebanyak 646 siswa saat itu menjalani pembelajaran jarak jauh.

Dari lima bangunan yang dimiliki sekolah, hanya satu bangunan yang tersisa. Namun, fasilitas tersebut tidak mampu menampung seluruh kegiatan pembelajaran.

BPMP Sumatera Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah atau school kits serta bantuan operasional kebersihan melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Kepala SMKN 1 Badiri, Julpiner Simanungkalit, saat itu merekomendasikan relokasi sekolah ke lokasi yang lebih aman demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

Pemerintah Janjikan Pemulihan Sekolah Terdampak

Kemendikdasmen menyatakan terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan terdampak bencana di Sumatera melalui siaran pers pada Kamis, 18 Juni 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan, "Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana."

Kemendikdasmen mencatat 4.922 satuan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana berdasarkan data per 9 Juni 2026.

Dari jumlah tersebut, 35 sekolah masih menggunakan tenda dan 52 sekolah memanfaatkan ruang kelas darurat. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Meski demikian, data tersebut merupakan rekapitulasi seluruh wilayah terdampak, bukan laporan khusus mengenai perkembangan pemulihan SMKN 1 Badiri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Belum Pulih dari Banjir, Desa Pertik Gayo Lues Kembali Diterjang Air Bah

Oleh Van · 8 Nov, 16.07 WIB



Kerusakan parah akibat banjir bandang yang membawa material kayu besar menghantam pemukiman warga.

GAYO LUES — Banjir bandang Desa Pertik Aceh dilaporkan terjadi pada Minggu, 8 November 2026, dini hari setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut sejak Sabtu sore.

Informasi kejadian dibagikan akun Threads @puturmdn pada Minggu, 8 November 2026. Luapan air sungai disebut menerjang permukiman warga di Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues.

"Akibat hujan dgn intensitas tinggi sedari Sabtu Sore mengakibat debit air sungai dari kawasan Pintu Rime meluap drastis," tulis akun @puturmdn.

Banjir Bandang Kembali Terjadi di Gayo Lues

Dalam unggahan tersebut, air bah disebut mengalir deras hingga menerjang kawasan permukiman. Pengunggah berharap peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebelumnya mencatat sejumlah kejadian banjir dan longsor di Kabupaten Gayo Lues sepanjang Oktober hingga awal November 2026.

Pada 29 Oktober 2026, BPBA melaporkan banjir dan angin puting beliung melanda sejumlah permukiman di Gayo Lues. Sementara pada 3 November 2026, longsor menutup beberapa ruas jalan di kabupaten tersebut.

Penanganan dan Kondisi Korban Masih Perlu Dipastikan

BPBA juga mencatat 26 kejadian banjir melanda Aceh sepanjang Oktober 2026. Ribuan warga terdampak dalam rangkaian bencana tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penanganan sungai di Gayo Lues, termasuk normalisasi Sungai Pining dan kawasan Pintu Rime pada Oktober 2026.

Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko luapan sungai dan banjir susulan di wilayah permukiman.

Namun, belum tersedia keterangan resmi yang dapat memastikan jumlah rumah terdampak, korban, maupun kondisi terkini warga Desa Pertik setelah kejadian Minggu dini hari.

Informasi mengenai dampak banjir bandang tersebut masih perlu diperbarui melalui pendataan BPBD Gayo Lues dan BPBA.(*)

EDUKASI

Prodi Pendidikan Doktor FKIP USK Gelar Sidang Disertasi Tertutup Pertama, Promovendus Pertama Dinyatakan Lulus

Oleh Hamdani · 7 Nov, 11.07 WIB

BANDA ACEH – Program Studi Pendidikan Doktor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK) mencatat tonggak sejarah baru dengan menggelar sidang tertutup disertasi pertama sejak program studi tersebut dibuka. Dalam sidang yang berlangsung Jumat (6/11/2026), promovendus pertama, Tgk. Maya Silviyanti, dinyatakan lulus setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji.

Sidang dipimpin Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP USK, Dr. Sanusi, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Dekan FKIP USK. Momentum ini menjadi bagian penting dalam perjalanan pengembangan pendidikan doktor sekaligus penguatan mutu akademik di lingkungan FKIP USK.

Disertasi Maya berjudul "Integrating VOKI into Collaborative Avatar Video Storytelling to Enhance Speaking Skill and Explore Students' Engagement, Responses and Challenges (A Mixed-Method Study at SMPIK Nurul Qur'an Aceh Besar)."

Penelitian tersebut mengkaji pemanfaatan teknologi digital VOKI melalui metode bercerita menggunakan avatar secara kolaboratif untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan, respons, dan tantangan siswa selama proses pembelajaran di SMPIK Nurul Qur'an Aceh Besar.

Prestasi Maya semakin diperkuat dengan publikasi artikel hasil penelitiannya pada jurnal TEFLIN yang bereputasi internasional dan terindeks Q1. Capaian tersebut menunjukkan kontribusi penelitian doktoral FKIP USK dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi pembelajaran di tingkat internasional.

Sidang ini menghadirkan empat penguji, yakni Prof. Dr. Burhanuddin Yasin, M.Ed., Prof. Dr. Asnawi, M.Ed., Prof. Dr. Mailizar, M.Ed., serta Dr. Revathi Gopal dari Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia, sebagai penguji eksternal.

Maya menjalani proses penelitian dan penyusunan disertasi di bawah bimbingan Prof. Dr. Yunisrina Qismullah Yusuf, S.Pd., M.Ling., selaku Promotor; Prof. Dr. Sofyan, M.A., selaku Ko-Promotor I; serta Prof. Dr. Iskandar A.S., S.Pd., M.App.Ling., selaku Ko-Promotor II.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OTOMOTIF

Skuter Roda 3 Piaggio MP3 Dapat Penyegaran, Benamkan Radar 4D hingga Cruise Control

Oleh Redaksi · 7 Nov, 13.09 WIB

BANDA ACEH - Piaggio MP3 memasuki dua dekade perjalanan dengan berbagai pembaruan teknologi, mulai dari sistem suspensi dua roda depan independen hingga Advanced Rider Assistance System (ARAS) berbasis radar 4D. Skuter roda tiga ini terus mengadopsi teknologi yang sebelumnya banyak digunakan pada kendaraan roda empat.

Sejak diperkenalkan pada 2006, Piaggio MP3 menghadirkan konsep mobilitas baru melalui konfigurasi dua roda depan yang dapat miring secara independen. Teknologi tersebut terhubung dengan sistem suspensi khusus yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas, daya cengkeram, serta kenyamanan berkendara.

Dalam keterangan tertulisnya, Piaggio menyebut konfigurasi ini menjadi salah satu karakter utama MP3. Berbeda dengan skuter konvensional, dua roda depan memberikan bidang kontak lebih luas dengan permukaan jalan, termasuk ketika kendaraan melintasi kondisi jalan yang licin.

Perkembangan Piaggio MP3 juga terlihat dari penggunaan mesin dengan kapasitas yang semakin beragam. Setelah debut dengan mesin 250 cc, lini ini berkembang melalui pilihan mesin 125 cc, 300 cc, 350 cc, hingga 500 cc.

Kini, Piaggio MP3 tersedia dalam pilihan mesin 310 cc, 400 cc, dan 530 cc. Pengembangan tersebut turut mencakup peningkatan performa, pengendalian emisi, serta penyesuaian terhadap standar Euro 5+.

Pada 2009, Piaggio juga memperkenalkan MP3 Hybrid, yang menjadi skuter pertama di dunia dengan sistem penggerak hybrid. Teknologi tersebut menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik untuk mengintegrasikan dua sumber tenaga dalam satu kendaraan.

Dari sisi keselamatan, MP3 mengadopsi ABS tiga kanal yang membantu mencegah roda terkunci ketika pengereman.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

3 BERITA

SPORT

Start dari Posisi 14, Veda Ega Pratama Finis Keempat di Moto3 Qatar 2026

Oleh Redaksi · 8 Nov, 20.51 WIB



BANDA ACEH, LUSAIL – Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Qatar 2026. Memulai lomba dari posisi ke-14, pebalap Honda Team Asia tersebut berhasil menembus empat besar setelah melewati persaingan ketat hingga lap terakhir.

Balapan seri ke-20 Moto3 2026 berlangsung di Sirkuit Lusail, Qatar, Minggu (8/11/2026) malam WIB. Maximo Quiles mengawali lomba dari posisi terdepan, sedangkan Veda harus berjuang dari barisan tengah.

Veda langsung memperlihatkan kemajuan sejak lampu start padam. Ia berhasil memperbaiki posisinya dan mengakhiri lap pertama di urutan ke-10. Pergerakannya berlanjut pada lap kedua dengan naik ke posisi kedelapan.

Memasuki lap ketiga, pebalap Indonesia itu kembali memperbaiki posisi ke urutan ketujuh. Satu lap berikutnya, Veda sudah berada di posisi keenam. Sementara itu, persaingan di barisan depan juga berubah setelah David Almansa mengambil alih pimpinan lomba dari Quiles.

Persaingan antarpembalap semakin ketat pada lap-lap berikutnya. Veda sempat turun ke posisi kedelapan pada lap keenam, tetapi mampu bangkit dan kembali menempati urutan kelima pada lap ketujuh.

Namun, posisinya belum sepenuhnya aman. Veda kembali kehilangan tempat setelah disalip Joel Esteban dan harus melanjutkan perjuangan di tengah persaingan kelompok pebalap yang memperebutkan posisi empat besar.

Memasuki lima lap terakhir, Veda terlibat duel ketat dengan Alvaro Carpe dan Esteban untuk memperebutkan posisi keempat. Ia berhasil melewati persaingan tersebut dan merebut posisi keempat pada lap ke-11.

Meski demikian, posisi tersebut kembali lepas pada lap ke-13. Veda turun ke urutan keenam sebelum kembali kehilangan satu tempat setelah disalip pebalap Malaysia, Hakim Danish, pada lap ke-15.

Peluang untuk kembali ke posisi empat besar terbuka pada lap terakhir. Hakim Danish melebar sehingga Veda berhasil naik ke posisi keenam. Pebalap Indonesia itu kemudian memanfaatkan momentum untuk melewati Esteban dan Carpe.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Veda berhasil mengamankan posisi keempat saat menyentuh garis finis, sekaligus mencatatkan hasil positif setelah memulai balapan dari posisi ke-14.

Sementara itu, David Almansa tampil sebagai pemenang Moto3 Qatar 2026. Ia finis di posisi pertama, diikuti Adrian Fernandez di urutan kedua dan Maximo Quiles di posisi ketiga.

Hasil Moto3 Qatar 2026

- David Almansa
- Adrian Fernandez
- Maximo Quiles
- Veda Ega Pratama
- Alvaro Carpe
- Joel Esteban
- Hakim Danish
- David Munoz
- Ryusei Yamanaka

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Rukun Sama Teman Sabet Dua Piala AMI Awards 2026, Penciptanya Ternyata Menteri Abdul Mu'ti

Oleh Van · 7 Nov, 09.38 WIB

JAKARTA — Siapa sangka, salah satu lagu anak yang berhasil membawa pulang dua penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 ternyata diciptakan oleh seorang menteri.

Lagu tersebut berjudul Rukun Sama Teman, karya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, yang dibawakan penyanyi muda Quinn Salman dan Prince Poetiray dengan penataan musik oleh Dwiki Darmawan.

Kolaborasi lintas generasi itu berhasil menyabet dua penghargaan dalam malam puncak AMI Awards ke-29 yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, 4 November lalu.

Dua penghargaan tersebut masing-masing diraih Quinn Salman dan Prince Poetiray untuk kategori Duo/Grup/Kolaborasi Anak-anak Terbaik, serta Dwiki Darmawan untuk kategori Penata Musik Lagu Anak-anak Terbaik.

Lantas, apa yang membuat lagu Rukun Sama Teman menarik hingga berhasil meraih dua penghargaan musik nasional?

Dikutip dari Keterangan Kemendikdasmen, Sabtu 7 November 2026, Rukun Sama Teman mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan pelajar, yakni persahabatan, toleransi, dan pencegahan perundungan atau bullying di sekolah.

Melalui liriknya, Abdul Mu'ti ingin menyampaikan pesan sederhana agar anak-anak saling menghormati, menyayangi, dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti teman.

Pesan tersebut kemudian dikemas dalam sebuah karya musik yang mempertemukan talenta penyanyi anak dengan pengalaman musisi senior.

Quinn Salman dan Prince Poetiray dipercaya menjadi penyanyi yang membawakan Rukun Sama Teman.

Sementara itu, Dwiki Darmawan, musisi yang dikenal melalui kiprahnya sebagai pemain keyboard, komposer, dan penata musik, mendapat kepercayaan menggarap aransemen lagu tersebut.

Saat menerima penghargaan AMI Awards 2026, Dwiki mengungkapkan bahwa lagu ini lahir dari kepedulian Abdul Mu'ti terhadap anak-anak Indonesia.

"Rukun Sama Teman dibuat agar kita rukun dengan teman, tidak ada perundungan di sekolah," ujar Dwiki, dalam keterangan itu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Start dari Posisi ke-14, Veda Ega Pratama Finis Keempat di Moto3 Qatar 2026

Oleh Redaksi · 8 Nov, 20.51 WIB



BANDA ACEH, LUSAIL – Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Qatar 2026. Memulai lomba dari posisi ke-14, pebalap Honda Team Asia tersebut berhasil menembus empat besar setelah melewati persaingan ketat hingga lap terakhir.

Balapan seri ke-20 Moto3 2026 berlangsung di Sirkuit Lusail, Qatar, Minggu (8/11/2026) malam WIB. Maximo Quiles mengawali lomba dari posisi terdepan, sedangkan Veda harus berjuang dari barisan tengah.

Veda langsung memperlihatkan kemajuan sejak lampu start padam. Ia berhasil memperbaiki posisinya dan mengakhiri lap pertama di urutan ke-10. Pergerakannya berlanjut pada lap kedua dengan naik ke posisi kedelapan.

Memasuki lap ketiga, pebalap Indonesia itu kembali memperbaiki posisi ke urutan ketujuh. Satu lap berikutnya, Veda sudah berada di posisi keenam. Sementara itu, persaingan di barisan depan juga berubah setelah David Almansa mengambil alih pimpinan lomba dari Quiles.

Persaingan antarpembalap semakin ketat pada lap-lap berikutnya. Veda sempat turun ke posisi kedelapan pada lap keenam, tetapi mampu bangkit dan kembali menempati urutan kelima pada lap ketujuh.

Namun, posisinya belum sepenuhnya aman. Veda kembali kehilangan tempat setelah disalip Joel Esteban dan harus melanjutkan perjuangan di tengah persaingan kelompok pebalap yang memperebutkan posisi empat besar.

Memasuki lima lap terakhir, Veda terlibat duel ketat dengan Alvaro Carpe dan Esteban untuk memperebutkan posisi keempat. Ia berhasil melewati persaingan tersebut dan merebut posisi keempat pada lap ke-11.

Meski demikian, posisi tersebut kembali lepas pada lap ke-13. Veda turun ke urutan keenam sebelum kembali kehilangan satu tempat setelah disalip pebalap Malaysia, Hakim Danish, pada lap ke-15.

Peluang untuk kembali ke posisi empat besar terbuka pada lap terakhir. Hakim Danish melebar sehingga Veda berhasil naik ke posisi keenam. Pebalap Indonesia itu kemudian memanfaatkan momentum untuk melewati Esteban dan Carpe.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Veda berhasil mengamankan posisi keempat saat menyentuh garis finis, sekaligus mencatatkan hasil positif setelah memulai balapan dari posisi ke-14.

Sementara itu, David Almansa tampil sebagai pemenang Moto3 Qatar 2026. Ia finis di posisi pertama, diikuti Adrian Fernandez di urutan kedua dan Maximo Quiles di posisi ketiga.

Hasil Moto3 Qatar 2026

- David Almansa
- Adrian Fernandez
- Maximo Quiles
- Veda Ega Pratama
- Alvaro Carpe
- Joel Esteban
- Hakim Danish
- David Munoz
- Ryusei Yamanaka

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SPORT

Marc Marquez Juara Sprint Race MotoGP Qatar 2026, Bezzecchi Terjatuh

Oleh Redaksi · 8 Nov, 01.42 WIB



BANDA ACEH, LUSAIL — Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Qatar 2026 di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, Sabtu (7/11/2026). Kemenangan tersebut diraih dalam balapan yang berlangsung dramatis, diwarnai dua insiden besar hingga harus dihentikan sementara akibat kibaran bendera merah (red flag).

Marquez menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 18 menit 46,450 detik. Hasil tersebut memberinya tambahan 12 poin sekaligus memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 411 poin.

Balapan yang semula dijadwalkan berlangsung selama 11 lap itu harus dihentikan pada lap kedua setelah Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team terlibat kecelakaan dengan Fermin Aldeguer. Insiden tersebut membuat penyelenggara mengibarkan bendera merah untuk menghentikan jalannya lomba.

Setelah situasi dinyatakan aman, balapan kembali dilanjutkan melalui prosedur restart dengan jarak yang dipangkas menjadi 10 lap. Dalam balapan ulang tersebut, Marquez menjadi salah satu dari empat pembalap yang menggunakan kombinasi ban medium di depan dan soft di belakang. Jorge Martin juga memilih kombinasi ban yang sama.

Drama kembali terjadi ketika Marquez terlibat benturan dengan pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, saat keduanya bersaing memperebutkan posisi terdepan. Kontak tersebut membuat Bezzecchi terjatuh dan gagal melanjutkan balapan.

Insiden itu juga sempat membuat kantong udara keselamatan (airbag) pada baju balap Marquez mengembang. Meski demikian, pembalap asal Spanyol tersebut mampu melanjutkan perlombaan.

Steward MotoGP kemudian mengategorikan benturan antara Marquez dan Bezzecchi sebagai racing incident atau insiden balap, sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada kedua pembalap.

Persaingan di barisan depan semakin ketat setelah Bezzecchi tersingkir. Jorge Martin sempat mengambil alih posisi terdepan dan berusaha mempertahankan keunggulannya. Namun, Marquez mampu kembali merebut pimpinan lomba hingga akhirnya menyentuh garis finis sebagai pembalap pertama.

Posisi kedua ditempati Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Pembalap Italia itu menyelesaikan balapan dengan selisih 0,862 detik dari Marquez.

Sementara itu, Jorge Martin dari Aprilia Racing harus puas finis di posisi ketiga dengan jarak 1,519 detik dari pemenang.

Hasil tersebut semakin menguntungkan Marquez dalam persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dengan tambahan 12 poin, ia kini mengantongi 411 poin dan semakin memperbesar peluang untuk mengunci gelar juara musim ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

4 BERITA

ACEH

Illiza Buka Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2026

Oleh Redaksi · 8 Nov, 20.49 WIB



BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal secara resmi membuka Pentas Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) Kota Banda Aceh tahun 2026, di Taman Budaya Aceh, Sabtu (8/11/2026).

Pentas tersebut menjadi ajang penampilan hasil pembelajaran seni budaya yang telah diikuti siswa SD dan SMP terpilih di ibu kota selama mengikuti program GSMS yang digagas Pemerintahan Illiza-Afdhal.

Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan GSMS, mulai dari dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, seniman pelatih, guru pendamping, hingga para peserta didik.

"Apa yang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ada latihan, ada kerja keras, ada keberanian, dan tentu ada bimbingan dari para seniman serta guru-guru yang mendampingi," ujarnya.

Ia menjelaskan, GSMS merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh yang diarahkan untuk memperkuat pendidikan seni dan budaya di sekolah.

Program ini ditujukan kepada siswa SD dan SMP, dengan melibatkan para seniman, komunitas, dan pegiat budaya yang ada di Kota Banda Aceh.

"Tujuannya jelas. Kita ingin anak-anak semakin mengenal dan mencintai seni budaya, sekaligus memiliki ruang untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya," kata Illiza.

Menurutnya, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar mata pelajaran di dalam kelas.

"Sekolah juga harus menjadi ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan mengenal kekayaan budaya daerahnya," ujarnya.

Illiza menyebut, program GSMS sudah dilaksanakan sedari 2025. Usai dicanangkan, program ini diikuti 40 sekolah, yang terdiri dari 30 SD dan 10 SMP, dengan melibatkan 448 siswa.

Pada 2026, program ini pun diperluas. Tahun ini GSMS melibatkan 51 sekolah SD dan SMP dengan 626 siswa-siswi, yang mendapatkan pembelajaran seni secara langsung dari 26 seniman dan pelatih.

Setiap sekolah mendapatkan pembelajaran sebanyak 20 kali pertemuan.

"Artinya, anak-anak tidak hanya datang untuk tampil hari ini. Mereka telah melalui proses belajar dan latihan yang cukup panjang," ujar Illiza.

Pada pentas hari ini, para peserta menampilkan berbagai karya seni yang telah dipelajari, antara lain Tari Ranup Lampuan, Ratoh Jaroe, Likok Pulo, Rapa'i Geleng, Rateb Meuseukat, baca puisi, pantomim, dan hikayat.

Masih menurut Illiza, seluruh aktivitas seni budaya tersebut masing-masing memiliki nilai, cerita, dan cara tersendiri dalam mengajarkan anak-anak untuk berani berekspresi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

5 Alasan Victoria Hotel Pilihan Tepat Hotel Keluarga di Jogja

Oleh Redaksi · 8 Nov, 18.04 WIB



Nikmati pengalaman menginap yang nyaman dengan desain arsitektur modern di The Victoria Hotel.

YOGYAKARTA - Kota Jogja masih menjadi tujuan wisata utama bagi banyak orang. Kota ini menawarkan destinasi wisata budaya dan tempat hiburan untuk anak maupun orang tua.

Berwisata bersama keluarga tentunya membutuhkan akomodasi yang nyaman saat merencanakan liburan ke Yogyakarta.

Karena itu, memilih hotel keluarga di Jogja dengan fasilitas yang sesuai dapat membantu keluarga menjalani rangkaian kegiatan wisata dengan lebih praktis.

The Victoria Hotel Jogja menawarkan fasilitas untuk kebutuhan liburan bersama keluarga.

Hotel yang berlokasi di Jalan Laksda Adisutjipto ini juga menyediakan fasilitas ramah anak.

Victoria Hotel Jogja dapat menjadi pilihan bagi Anda yang mencari tempat menginap dengan kamar keluarga dan wahana rekreasi di dalam hotel. Berikut ulasannya.

Menyediakan Kamar Khusus Keluarga

The Victoria Hotel Jogja menyediakan New Superior Room seluas 24 meter persegi dengan kapasitas dua orang dewasa dan satu anak. Hotel ini juga menawarkan tipe Superior seluas 24 meter persegi serta Deluxe seluas 25 meter persegi. Pilihan tersebut memberi keluarga alternatif kamar sesuai kebutuhan selama menginap.

Setiap kamar dilengkapi pendingin udara, televisi pintar, serta pembuat teh dan kopi. Tamu juga dapat menggunakan shower dengan pilihan air panas dan dingin. Fasilitas tersebut mendukung kebutuhan istirahat dan rutinitas keluarga selama berada di hotel, termasuk saat orang tua dan anak berbagi waktu di kamar.

Memberikan Tiket Victoria Land

Pengelola memberikan akses gratis ke Victoria Land, wahana bermain anak yang berada di area hotel. Anak dapat melakukan aktivitas fisik di wahana tersebut, sementara orang tua dapat menemaninya. Karena tiket masuk tidak dikenakan biaya tambahan, keluarga bisa memasukkan kegiatan bermain ini ke dalam agenda menginap.

Victoria Land mendukung kebutuhan rekreasi anak selama liburan di kawasan Catur Tunggal. Anak dapat mengisi waktu luang dengan bermain tanpa harus meninggalkan lingkungan hotel. Fasilitas ini memberi keluarga pilihan kegiatan di sela agenda wisata, sekaligus membantu anak menikmati waktu menginap di The Victoria Hotel Jogja.

Meminjamkan Busana Adat Gratis

The Victoria Hotel Jogja menyediakan layanan peminjaman busana adat Jawa secara gratis bagi tamu keluarga. Dengan mengenakan pakaian tradisional khas Yogyakarta, anggota keluarga dapat berfoto bersama selama menginap. Layanan ini memberi kesempatan untuk mengabadikan kebersamaan tanpa perlu menyewa kostum dari tempat lain.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Pencemaran Nama Baik, Fitnah, dan Pelanggaran UU ITE

Oleh Redaksi · 8 Nov, 13.25 WIB



Presiden ke-7 yang terhormat Joko Widodo alias Jokowi. FOTO/Net.

Oleh: Sugiyono((Anggota Associate Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana))

AKSA Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo Notodipuro dan Tifauzia Tyassuma dengan UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan UU ITE.

Delik aduan resmi Joko Widodo tersebut adalah tentang pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran UU ITE terkait tuduhan ijazah palsu.

Terdakwa diduga melakukan pencemaran nama baik melalui tulisan/media, namun terdakwa gagal membuktikan tuduhannya saat diberikan kesempatan, sehingga dapat dikategorikan sebagai dakwaan primer pelanggaran UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1).

Juga terhadap pencemaran nama baik secara tertulis atau melalui sarana media/gambar yang menyerang kehormatan seseorang di muka umum, sebagai dakwaan subsider yang melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1).

Pasal 433 ayat (1) mengatur tentang setiap orang yang dengan kesadaran dan kehendak penuh menyerang reputasi korban (Joko Widodo).

Terdakwa hendak dibuktikan telah merendahkan martabat, harga diri, atau reputasi korban.

Terdakwa melakukan atau menyebarkan tuduhan dengan niat yang jelas agar didengar, dibaca, atau diketahui oleh orang banyak, misalnya di ruang publik atau melalui media sosial.

Tenggat waktu pengajuan aduan adalah 6 bulan sejak korban mengetahui adanya perbuatan terdakwa.

Terdakwa juga didakwa melanggar UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang ITE, khususnya Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) juncto UU Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.

Itu merupakan pelanggaran terhadap larangan mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, atau merusak informasi elektronik milik orang lain secara tidak sah.

Terdakwa Roy Suryo juga didakwa melanggar UU ITE Pasal 35, yang mengatur tentang manipulasi atau penciptaan informasi elektronik yang seolah-olah otentik.

Terdakwa sesungguhnya akan sulit bebas dari tuntutan pidana, karena terdakwa menyampaikan informasi atau kritik yang sama sekali tidak terkait dengan kebijakan Joko Widodo, demi kemaslahatan masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (3).

Terdakwa Roy Suryo antara lain mengklaim bahwa foto pada ijazah sarjana tersebut bukan foto asli Joko Widodo.

Juga menuduh almarhumah Sujiatmi Notomiharjo bukan ibu kandung Joko Widodo.

Suatu ijazah sarjana terindikasi palsu jika nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, atau nama lulusan tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) atau Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

BISNIS

Kejagung Bongkar Dugaan Suap Penyelenggara Negara di Tambang Nikel Sultra, Siapa Penerimanya?

Oleh Redaksi · 8 Nov, 09.09 WIB



BANDA ACEH - Dugaan praktik korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin mengarah pada persoalan serius. Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah membongkar dugaan pemberian suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada penyelenggara negara untuk memuluskan berbagai kepentingan bisnis pertambangan.

Dugaan tersebut bukan sekadar menyangkut pengurusan administrasi perizinan. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya praktik pemberian uang yang berkaitan dengan proses produksi hingga penjualan hasil tambang nikel.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan fakta mengenai dugaan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi pertambangan.

"Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," kata Saiful di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dikutip Minggu (8/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena dugaan praktik suap itu berkaitan dengan sektor strategis yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Jika terbukti, persoalannya bukan hanya mengenai aktivitas perusahaan tambang, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara.

Saat ditanya mengenai pihak penyelenggara negara yang diduga menerima pemberian tersebut, Saiful menjelaskan bahwa dugaan suap berkaitan dengan kewenangan dalam penerbitan izin pertambangan, produksi, hingga penjualan nikel.

"Kemudian terkait dengan adanya pemberian-pemberian kepada penyelenggara negara, tentunya dalam proses pengelolaan tambang nikel, tentunya dalam proses-proses itu ada kaitan dengan penyelenggara negara dalam pemberian izin-izin, dan produksi, serta penjualan," ujarnya.

Saiful menegaskan, dugaan pemberian suap tersebut terungkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh penyidik dari pemeriksaan sejumlah saksi.

"Di situ dari fakta-fakta hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap saksi-saksi, diperoleh adanya fakta-fakta itu. Dan nantinya tentunya ini masih materi penyidikan, nanti akan kami sampaikan dalam surat dakwaan nanti akan tergambar," ungkapnya.

Arif Kurniawan Kendalikan Enam Perusahaan Tambang

Di balik pengusutan dugaan suap tersebut, Kejagung juga mengungkap sosok berinisial AK yang disebut sebagai pengendali sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara.

Keterangan penyidik menyebut, dugaan peran AK sebagai pengendali didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap 38 saksi.

"Fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi. Bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK," kata Saiful.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin